



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 05 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)**

**KOTA MADIUN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di Kota Madiun diperlukan perencanaan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi dan proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang ;
  - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah ;
  - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA MADIUN TAHUN 2005-2025.**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025.

### **Pasal 2**

- (1) Materi beserta uraian rinci Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II KONDISI UMUM KOTA MADIUN
  - c. BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
  - d. BAB IV PENUTUP

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009  
NOMOR 3/E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 05 TAHUN 2009  
TANGGAL : 26 Mei 2009

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi dan proyeksi sesuai kebutuhan kota dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

RPJP Kota Madiun memiliki karakteristik sebagai berikut : pertama lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategik dengan sasaran yang dinamis; kedua mengikuti kecenderungan baru; ketiga lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

RPJP Kota Madiun dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan : Planologik, Politik, Partisipatif, Atas Bawah (*Top-Down*), dan Bawah Atas (*Bottom-Up*). Dengan demikian diharapkan perencanaan yang disusun merupakan kesepakatan bersama, serta berfungsi menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan disusunnya RPJP Kota Madiun adalah mewujudkan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan Kota. RPJP juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kota Madiun.

### C. LANDASAN PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota ;

#### **D. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun ini disusun dengan memperhatikan Rancangan Undang-Undang RPJP Nasional dan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur yang menyangkut Kota Madiun sebagai wilayah perencanaannya.

Kedudukan dan fungsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebagai dokumen kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari kehendak masyarakat Kota Madiun serta menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta seleksi penjaringan Visi dan Misi calon Walikota.

#### **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II KONDISI UMUM KOTA MADIUN**

- A. Geografis
- B. Demografi
- C. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- D. Ekonomi
- E. Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
- F. Tata Ruang
- G. Sarana & Prasarana
- H. Politik dan Pemerintahan

### **BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Pembangunan Daerah

### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **KONDISI UMUM KOTA MADIUN**

Sehubungan dengan kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, maka substansi yang termuat didalamnya adalah gambaran makro tentang wilayah yang direncanakan disertai analisis makro sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang dikehendaki. Untuk menjaga konsistensinya dengan sistem perencanaan secara utuh, maka analisis makro tersebut tetap harus didasarkan pada dokumen-dokumen perencanaan lain, baik dari yang ada di teritori tingkat atasnya maupun pada dokumen perencanaan internal yang telah ada.

Gambaran kondisi umum dan analisis yang disajikan dalam dokumen ini antara lain juga bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur sebagai teritori yang membawahi Kota Madiun dan RTRW Kota Madiun Tahun 2002 - 2012 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah internal Kota Madiun.

Berikut ini adalah gambaran dan analisis makro yang antara lain mendeskripsikan berbagai aspek kehidupan yang meliputi bidang kependudukan, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, tata ruang, sarana dan prasarana, serta politik dan pemerintahan.

#### **A. GEOGRAFIS**

Wilayah Kota Madiun berada pada  $111^{\circ}$  -  $112^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}$  -  $8^{\circ}$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $\pm 33,23$  km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Madiun terdiri dari tiga kecamatan yang berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Madiun
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan

Topografi Kota Madiun cenderung datar berada di dataran sedang dengan ketinggian rata-rata dari atas permukaan laut  $\pm 65$  m. Dibagian selatan sedikit lebih tinggi dibanding di bagian tengah dan utara yaitu  $\pm 67$  m, di bagian tengah elevasinya  $\pm 63$ m dan dibagian utara elevasinya  $\pm 64$  m.

Komposisi batuan di wilayah Kota Madiun didominasi tanah aluvium endapan sungai, umumnya tersusun oleh bahan-bahan berbutir halus (lempung, lanau, dan pasir). Di sebagian utara merupakan tanah aluvium endapan rawa dan danau tersusun terutama oleh lempung yang kedap air.

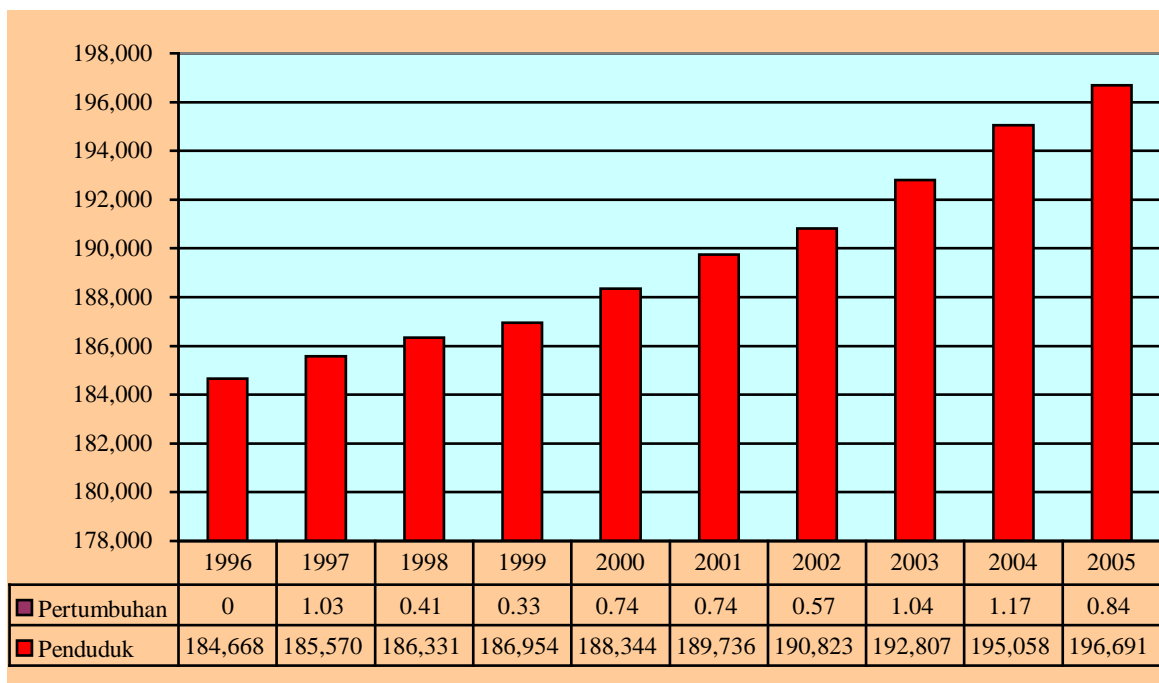
Iklim Kota Madiun dicirikan dengan suhu udara berkisar 20-35<sup>0</sup> C. Kelembaban nisbi udara 78%. Kecepatan angin rata-rata 12 knot.

Berdasarkan pemantauan dari 2 stasiun pengamatan, wilayah Kota Madiun memiliki lama hari hujan rata-rata sekitar 100 hari per tahun, dengan curah hujan 2000 mm/tahun.

## B. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 1996 sebanyak 184.668 jiwa, dan terus meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,76% menjadi 196.691 jiwa pada tahun 2005, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 1  
Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun  
Tahun 1996 - 2005



Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2005

Dengan mengacu rata-rata laju pertumbuhan penduduk di atas, proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 228.848 jiwa, dengan rata-rata kelahiran di Kota Madiun sebesar 2.209 jiwa/tahun dan rata-rata kematian sebesar 1.228 jiwa/tahun.

Sebaran penduduk terkonsentrasi di pusat kota (Kel. Kartoharjo, Kel. Pangongangan, Kel. Kejuron, Kel. Pandean, Kel. Nambangan Lor). Konsentrasi yang demikian itu masih ditambah penduduk pekerja musiman dan pekerja sektor informal yang cenderung tinggal di wilayah tersebut karena pertimbangan ekonomi untuk menekan biaya transportasi walaupun terpaksa tinggal ditempat yang kurang memadai.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 – 2012 telah termuat konsep untuk rencana distribusi penduduk antara lain melalui upaya mengembangkan daya tarik Bagian Wilayah Kota (BWK) diluar pusat kota untuk dikembangkan kawasan-kawasan pemukiman sehingga dimungkinkan pengurangan konsentrasi penduduk yang padat di pusat kota.

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2002 BWK Pusat kota dan sekitarnya seluas 449.631 ha didiami sekitar 58.708 jiwa yang berarti tingkat kepadatan penduduknya 131 jiwa per ha, sementara di BWK Barat (kota bagian barat) seluas sekitar 787.948 ha angka kepadatan penduduk hanya mencapai sekitar 32 jiwa per ha. Demikian juga di BWK Selatan (yang mencakup wilayah kota bagian selatan dan timur) pada angka kepadatan sekitar 70 jiwa per ha, serta BWK Utara (yang mencakup kota bagian utara dan timur) tingkat kepadatan penduduk sekitar 48 jiwa per ha. Dengan tingkat kepadatan penduduk dan sebaran penduduk yang tidak seimbang dan merata itu diperlukan kebijakan pengembangan daya tarik pada setiap BWK agar distribusi penduduk bisa lebih seimbang dan merata. Pengembangan daya tarik itu antara lain mencakup pengembangan kawasan perkantoran, pertokoan, permukiman, pendidikan dan sebagainya.

## **Tantangan**

Tantangan utama adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk kota agar tidak melebihi pertumbuhan penduduk nasional, diimbangi dengan kebijakan keseimbangan penyebaran penduduk termasuk terhadap penduduk musiman dan urban yang bekerja dan tinggal di kota Madiun.

### C. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

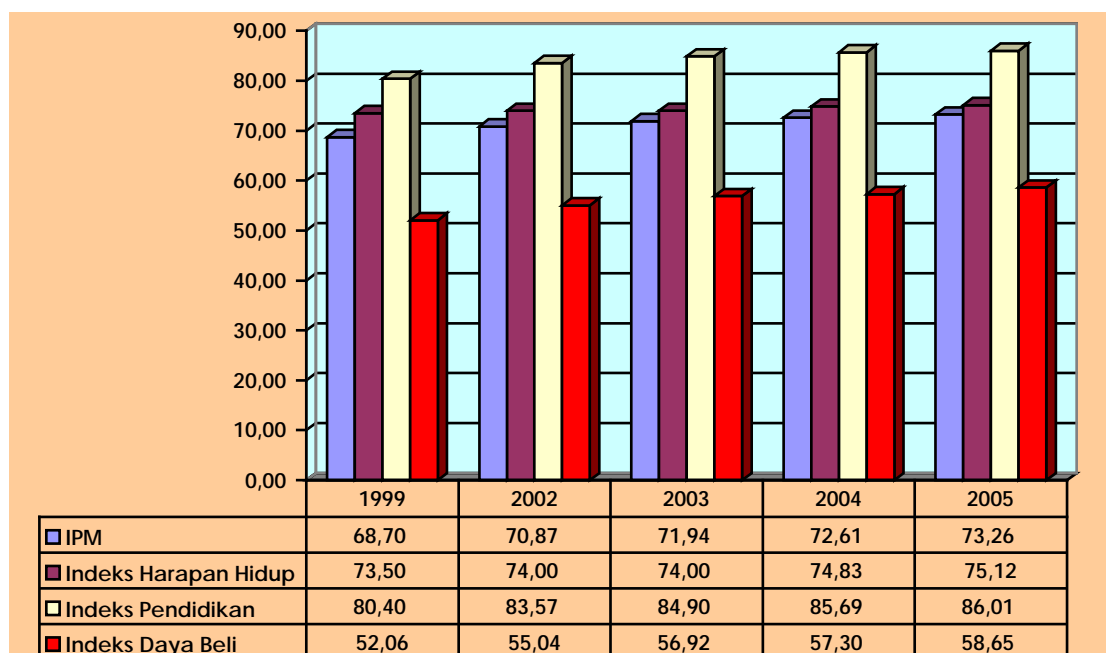
#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan adalah pencapaian status pembangunan manusia yang dapat dilihat melalui besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) yang menggunakan 3 (tiga) komponen bidang pembangunan manusia sebagai dasar penghitungan yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Hasil pembangunan 5 tahun terakhir menunjukkan pencapaian angka IPM Kota Madiun adalah 68,70 pada tahun 1999, dan terus mengalami peningkatan sehingga menjadi 73,26 pada tahun 2005 dan berada pada tingkatan menengah atas (Nomor 2 di Jawa Timur), yang berarti bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pembangunan manusia (*human development*) untuk lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Nilai IPM dan komponennya selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Gambar : 2

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia  
Tahun 1999 – 2005



Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia 2005

## **Tantangan**

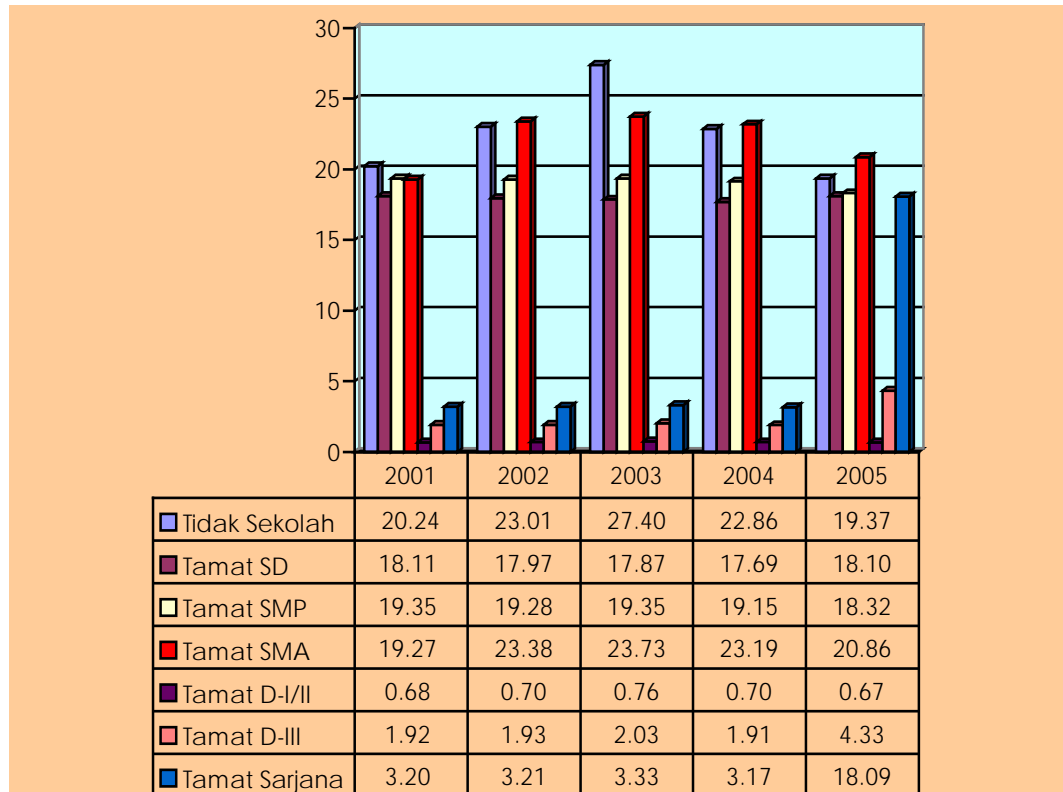
Tantangan pembangunan manusia di masa depan terletak pada upaya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan manusia agar tercapai kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif.

## **2. Pendidikan**

Perkembangan pembangunan pendidikan dapat diketahui dari beberapa indikator yang relevan dengan masalah pendidikan diantaranya adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lamanya sekolah, dan tingkat partisipasi sekolah. Hasil pembangunan pendidikan 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka melek huruf dari penduduk Kota Madiun yang berusia 10 tahun keatas mencapai 95,97% dan sisanya 4,03 % buta huruf atau tidak dapat baca tulis. Rata-rata lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani sebesar 9,91 tahun yang berarti bahwa penduduk Kota Madiun rata-rata sudah mengenyam pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sudah masuk ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingkat pendidikan penduduk Kota Madiun yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 670 orang (0,34%), tidak/belum tamat SD sebanyak 37.122 orang (19,03%), tamat SD sebanyak 35.300 orang (18,10%), tamat SMP sebanyak 35.725 orang (18,32%), tamat SMA/MA sebanyak 21.035 orang (10,78%), tamat SMK sebanyak 19.680 orang (10,78%), tamat Diploma I & II sebanyak 1.300 orang (0,67%), tamat Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 35.280 orang (4,33%) dan tamat Sarjana sebanyak 35.280 orang (18,09%).

Dalam tiga tahun terakhir prosentase penduduk berpendidikan rendah semakin menurun diikuti dengan meningkatnya prosentase penduduk berpendidikan tinggi, seperti yang tergambar sebagai berikut :

Gambar : 3  
Perkembangan Tingkat Pendidikan Penduduk  
Tahun 2001 – 2005



Sumber : Profil Pendidikan 2001 – 2005.

Upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik, hal ini ditunjukkan oleh pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur SD (7-12 tahun) sebesar 97,30%. APS kelompok umur SMP (13-15 tahun) sebesar 100% dan APS kelompok umur SMA (16-18 tahun) sebesar 81,65%.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Madiun saat ini adalah untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 81 lembaga, SD/MI sebanyak 89 lembaga, SMP/MTs sebanyak 23 lembaga, dan SMA/MA/SMK sebanyak 43 lembaga, Perguruan Tinggi 15 lembaga. Fasilitas pendidikan tersebut diatas telah mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah di Kota Madiun.

Kinerja pendidikan saat ini juga belum sepenuhnya mampu memberi layanan pendidikan secara penuh di setiap jenjang pendidikan, khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini dimana APK TK/RA baru mencapai 70,25% yang menunjukkan cakupan pelayanan pendidikan dan peran serta masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan.

Sementara dari sisi kompetensi tenaga pengajar menunjukkan gambaran masih diperlukan peningkatan kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan terutama dengan berlakunya Undang-undang Guru dimana seorang guru dituntut untuk memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas SDM guru yang telah dilaksanakan selama dasa warsa terakhir menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah guru 1.320 orang terdapat 83% guru telah sesuai kualifikasi, dan 17% tidak sesuai kualifikasi. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dengan jumlah guru 896 orang terdapat 84% guru telah sesuai kualifikasi, dan 16% tidak sesuai kualifikasi. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dengan jumlah guru 1.678 orang, sebanyak 87% telah sesuai klasifikasi dan 13% tidak sesuai kualifikasi.

Peningkatan kualitas sarana prasarana dan mutu pendidikan di kota Madiun juga masih terus dikembangkan agar proporsional dengan peran kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP. Pembangunan SNBI (Sekolah Nasional Berstandar Internasional), upaya peningkatan standar pada sekolah-sekolah tertentu dan sekolah-sekolah unggulan, upaya untuk realisasi berdirinya Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas diharapkan akan menjadi katalisator terwujudnya peran Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.

## **Tantangan**

Beberapa tantangan bidang pendidikan ke depan adalah :

- a. peningkatan kualitas SDM Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen
- b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang proporsional dengan peran Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.
- c. alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-Undang.

### 3. Kesehatan

Perkembangan pembangunan kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk melihat taraf kesehatan penduduk antara lain : Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan pertolongan persalinan.

Usia Harapan Hidup Kota Madiun telah mencapai 70,07 tahun, di atas Usia Harapan Hidup Nasional sebesar 65 tahun, bahkan melampaui target nasional 2010 sebesar 67,9 tahun yang berarti setiap bayi yang lahir mempunyai harapan untuk tetap hidup sampai usia lebih 70 tahun.

Angka Kematian Bayi Kota Madiun saat ini sebesar 31 per 1000 kelahiran hidup dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Angka tersebut telah melampaui target Departemen Kesehatan sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta penduduk secara luas di wilayah tertentu serta keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Pertolongan persalinan di Kota Madiun sebesar 95,88% dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan 4,12% sisanya dilaksanakan oleh bukan tenaga kesehatan. Jumlah tersebut telah melampaui target Departemen Kesehatan untuk Indonesia Sehat 2010 sebesar 90%.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain adalah rasio puskesmas, serta jangkauan pelayanan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan per penduduk.

Hasil pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa telah terdapat 5 Puskesmas dan 17 Puskesmas Pembantu. Rasio Puskesmas adalah 2,94 per 100.000 penduduk yang berarti untuk setiap puskesmas harus melayani 34.052 jiwa penduduk. Jumlah puskesmas tersebut diatas perlu untuk ditambah mengingat standart pelayanan kesehatan menetapkan cakupan pelayanan setiap Puskesmas sebesar 30.000 penduduk. Kesadaran kepesertaan Jaminan pemeliharaan kesehatan di Kota Madiun sampai dengan tahun 2006 mencapai 31,79 % dari jumlah penduduk terdiri dari peserta Askes 14,32%, anggota Dana Sehat 9,42%, memiliki Kartu Sehat 8,05 %.



Tenaga kesehatan di Kota Madiun menunjukkan jumlah yang berimbang dengan jumlah penduduk Kota Madiun, sehingga dari segi jumlah tenaga kesehatan sangat memadai untuk peningkatan kualitas kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan telah menyebabkan perubahan pola hidup sebagian masyarakat. Oleh karena itu tantangan kedepan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan perubahan lingkungan, disamping profesionalisme aparatur kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan perwujudan budaya serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat .

Di Kota Madiun terdapat beberapa Rumah Sakit baik milik Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Provinsi maupun Swasta. Jumlahnya diprediksikan akan masih terus bertambah mengingat masih terdapat banyak proses pendirian Rumah Sakit baik yang masih berjalan maupun dalam taraf pengajuan perizinan. Mengingat secara umum pelayanan Rumah Sakit - Rumah Sakit tersebut masih bersifat umum, perlu dipikirkan agar ke depan diarahkan pengembangan Rumah Sakit Umum dengan fasilitas pelayanan spesialis dengan unggulan tertentu ataupun Rumah Sakit spesialis dan klinik-klinik spesialis sehingga kebutuhan masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya terhadap jasa pelayanan tersebut tidak harus dicukupi oleh Rumah Sakit yang ada di luar provinsi maupun ibukota provinsi.

### **Tantangan**

Tantangan pembangunan kesehatan Kota Madiun adalah :

- a. peningkatan kualitas dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan yang ada di kota Madiun dengan orientasi sebagai pusat pelayanan kesehatan skala SWP.
- b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah, murah, efektif dan efisien untuk masyarakat bawah.

## **4. Kehidupan Beragama**

Perkembangan kehidupan beragama di Kota Madiun telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan kelancaran pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan sehingga umat beragama lebih mudah dalam melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.

Disamping itu pelaksanaan kegiatan pengajian yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah dan masyarakat telah berkembang dengan baik di Kota Madiun. Pembangunan keagamaan memberikan andil yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan amal dan bantuan sosial, membayar zakat, infaq, sodaqoh serta kegiatan amal keagamaan yang lain dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Disamping juga dapat menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan juga mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tenteram, saling bahu membahu bersatu dalam mewujudkan gotong royong membangun Kota Madiun.

Hal ini tercermin antara lain dengan adanya Paguyuban Umat Beragama dan Kepercayaan Kota Madiun (PUBKM) yang melaksanakan kegiatan mulai tingkat Kota sampai ke tingkat Kelurahan, disamping lembaga-lembaga dan yayasan keagamaan yang berkembang di Kota Madiun.

### **Tantangan**

Tantangan untuk kehidupan beragama Kota Madiun saat ini dan dimasa depan adalah:

- a. menjaga kualitas hubungan antar umat beragama agar mampu menjadi dasar dalam menciptakan kerukunan, persatuan dan kedamaian sebagai kontribusi terhadap situasi kondusif yang dibutuhkan masyarakat.
- b. mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.

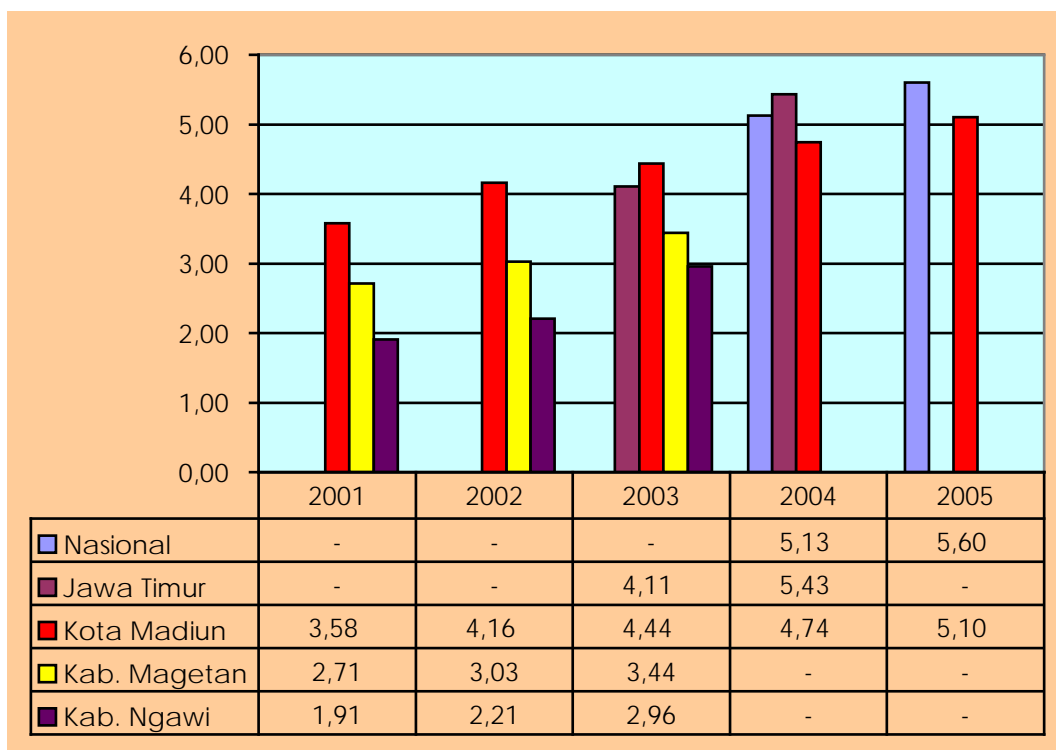
## **D. EKONOMI**

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan kenaikan dari 3,58% pada tahun 2001 menjadi 5,10% pada tahun 2005 atau rata-rata pertumbuhan 0,304% setiap tahunnya.

Rata-rata pertumbuhan tersebut lebih rendah/tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebagai berikut :

Gambar : 4

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun  
Dengan Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

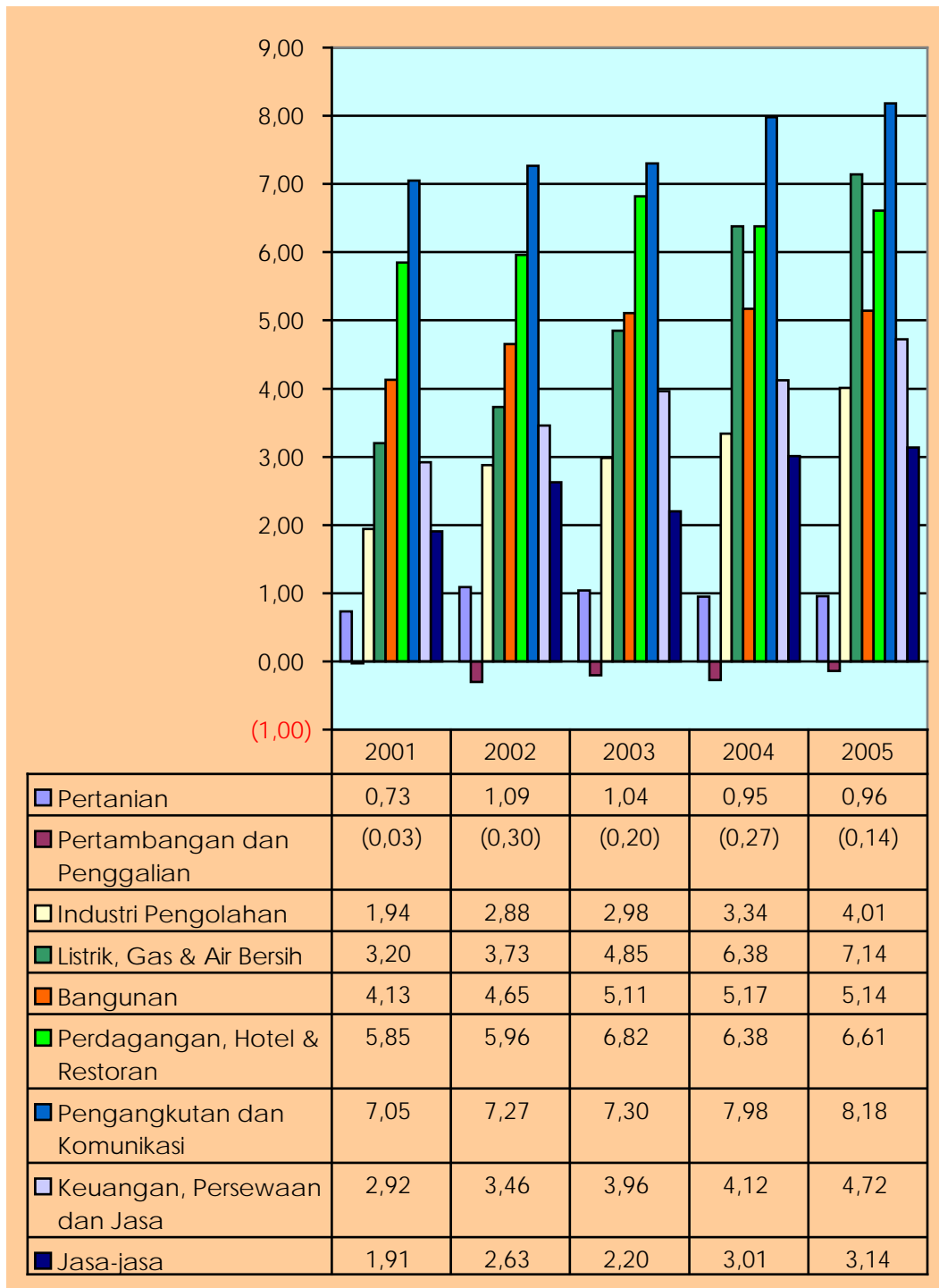


Sumber : PDRB Kota Madiun Tahun 2005

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mencapai 5,10% pada tahun 2005. Angka ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik jika dibanding tahun 2004. Pertumbuhan paling tinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 8,18%. Selanjutnya sektor listrik, gas dan air bersih yang menunjukkan angka 7,14%, yang menunjukkan kenaikan signifikan, yaitu naik 6,38% dari tahun 2004. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi ketiga yaitu sebesar 6,61%.

Adapun pertumbuhan menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut :

Gambar : 5  
Laju Pertumbuhan Sektor Usaha Terhadap PDRB  
Tahun 2001 – 2005



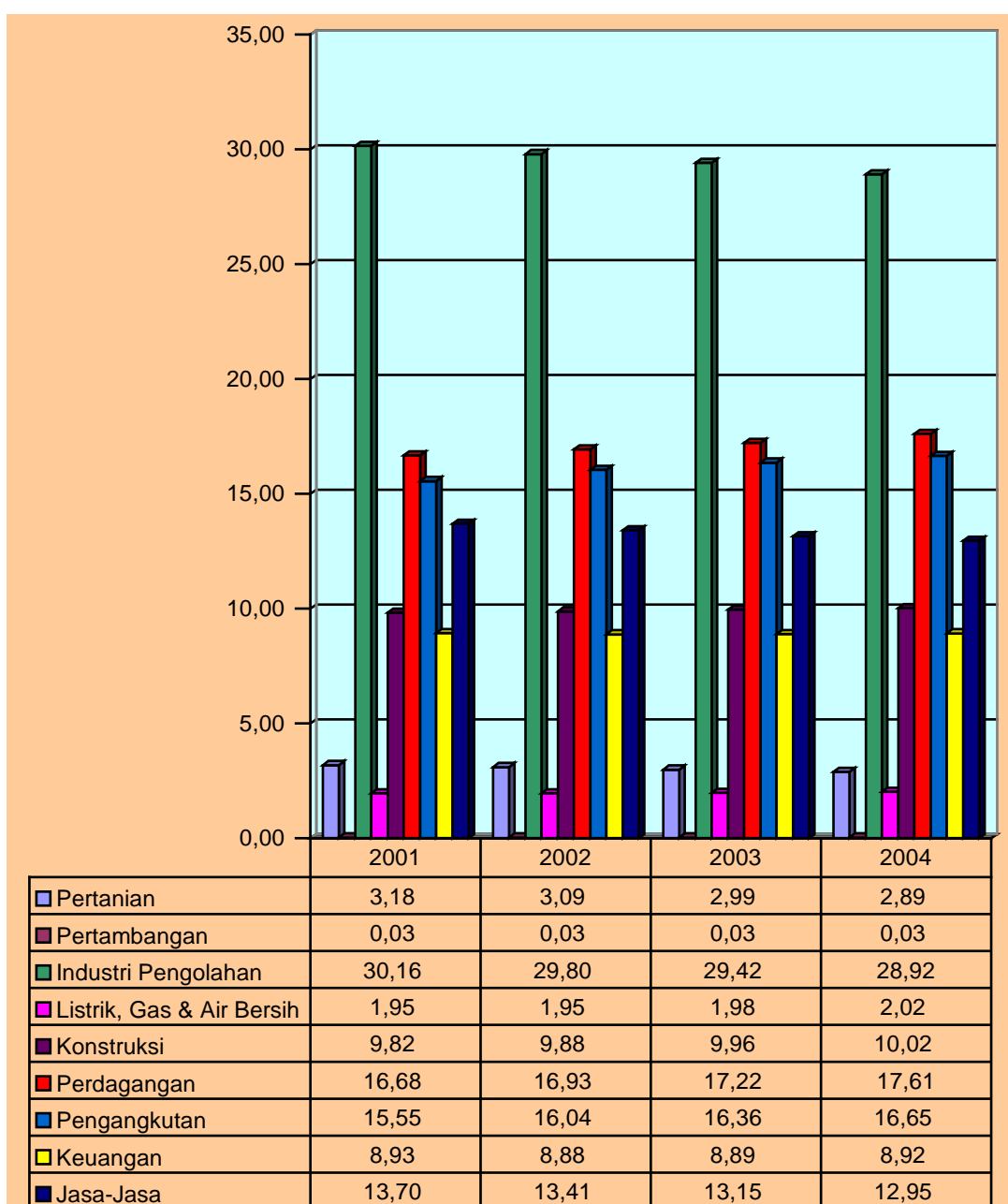
Sumber : PDRB Kota Madiun Tahun 2005

Ciri perekonomian suatu daerah ditunjukkan oleh sumbangan masing-masing sektor ekonomi (lapangan usaha) dalam membangun struktur ekonomi secara utuh.

Secara kuantitatif sumbangan tersebut dapat diukur dengan indikator peranan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, sebagai berikut :

Gambar : 6

Sumbangan Sektor Usaha Terhadap PDRB  
Tahun 2001 -2004 (Harga Konstan 1993)



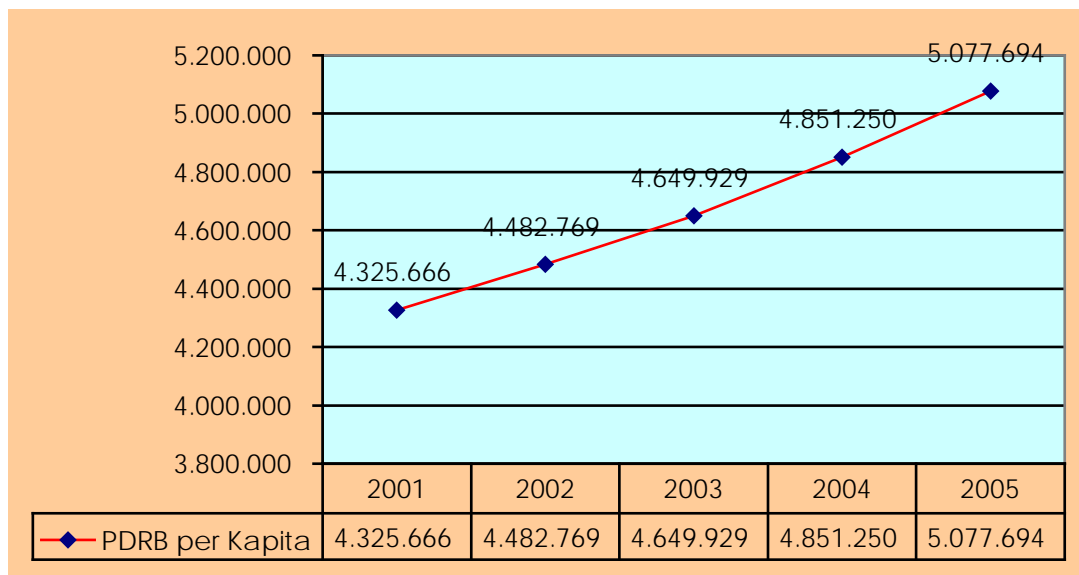
Sumber : PDRB Kota Madiun Tahun 2001 – 2004.

Dari data di atas, sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap PDRB, kemudian diikuti sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Namun demikian sektor Industri Pengolahan sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan, sedangkan sektor Perdagangan, hotel & restoran dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami kenaikan.

Mengingat laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2005 sebesar 4,01% jauh di bawah sektor Perdagangan, hotel & restoran dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang masing-masing sebesar 6,61% dan 8,18% serta Kota Madiun berada di lokasi strategis untuk menuju hinterland sekelilingnya, maka sektor Perdagangan dan sektor Pengangkutan sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan.

Salah satu parameter pembangunan utamanya di bidang ekonomi adalah Pendapatan Regional Bruto per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga konstan lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 4.325.666,00 tahun 2001 menjadi Rp 5.077.694,00 tahun 2005 atau kenaikan rata-rata 3,47 % setiap tahunnya.

Gambar : 7  
PDRB per Kapita  
Tahun 2001 – 2005



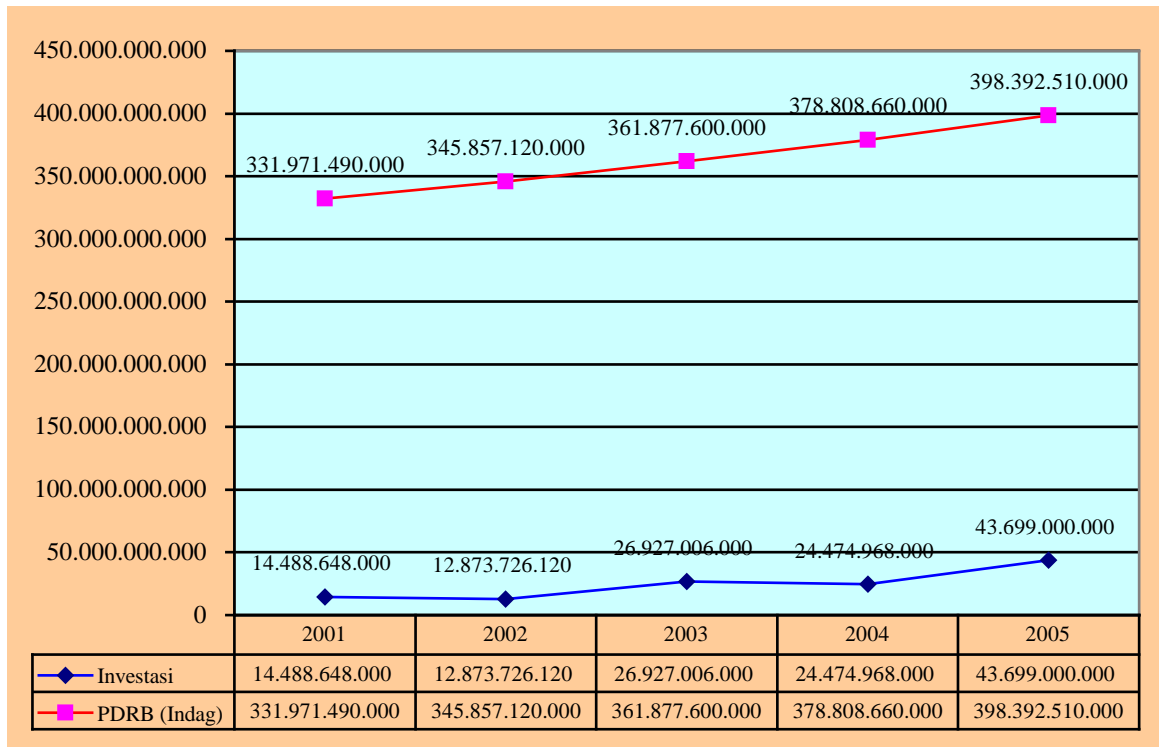
Sumber : PDRB Kota Madiun Tahun 2005

Pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita yang cukup tinggi tersebut selain disebabkan kenaikan PDRB juga karena keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu kenaikan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,76% setiap tahunnya.

Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena mempunyai *multiplier effect* yang tinggi.

Adapun perkembangan investasi sektor industri dan perdagangan dari tahun 2001 sampai dengan 2005 tergambar sebagai berikut :

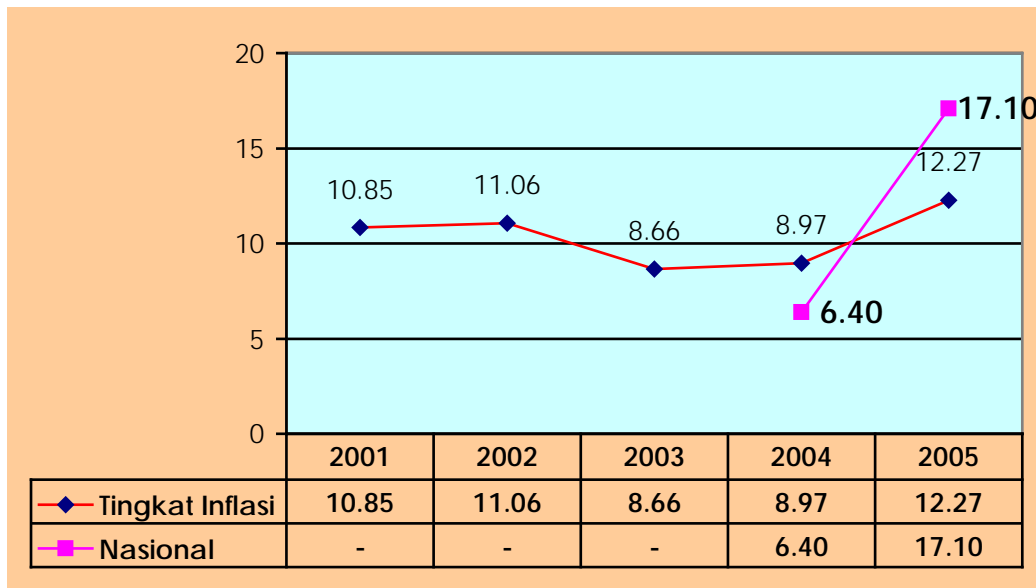
Gambar : 8  
Perkembangan Investasi Kota Madiun dan Pengaruh Terhadap PDRB Kota Madiun Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2001 – 2005



Sumber : - PDRB Kota Madiun Tahun 2005  
- Perkembangan Investasi, Bag. Perekonomian Setkota Tahun 2005

Perkembangan tingkat inflasi lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Gambar : 9  
Tingkat Inflasi Kota Madiun  
Tahun 2001 – 2005



Sumber : PDRB Kota Madiun Tahun 2005

Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2001 sebesar 10,85%, dan terus menurun menjadi 8,97% pada tahun 2004. Namun demikian laju inflasi tahun 2004 tersebut masih di atas nasional yang hanya sebesar 6,40%.

Pada tahun 2005 laju inflasi Kota Madiun mengalami kenaikan cukup besar menjadi 12,27%, disebabkan adanya perubahan suhu politik dan kenaikan bahan bakar minyak dengan rata-rata kenaikan 127%, yang mempunyai dampak sangat luas terhadap perubahan harga di sektor lainnya. Namun demikian angka inflasi tersebut masih di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 17,10%.

Usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam menekan laju inflasi, adalah dengan mengoptimalkan kelancaran distribusi barang dan jasa, khususnya kebutuhan bahan pokok.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan tingkat pengangguran, adapun indikator keberhasilan untuk pengelolaan masalah ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :



Tabel : 1  
Kondisi Ketenagakerjaan  
Tahun 2001 – 2005

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
Penduduk Usia Kerja					
Angkatan Kerja	73.000	71.604	72.073	78.311	78.883
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	57,94	56,69	55,32	57,00	61,29
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	88,80	86,12	86,84	87,04	85,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,20	13,88	13,16	12,96	14,53

*Sumber : Analisis Situasi Pembangunan Manusia  
Kota Madiun Tahun 2005*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari kerja mengalami peningkatan rata-rata 2,03% pertahun, sedangkan tingkat kesempatan kerja yaitu tingkat angkatan kerja yang sudah bekerja cenderung menurun, demikian pula jumlah pengangguran terbuka juga cenderung mengalami peningkatan, bahkan mencapai 14,53% pada tahun 2005, jauh di atas nasional yang hanya 10,8%.

Dengan demikian dapat disimpulkan kesempatan/lapangan kerja belum dapat seluruhnya menyerap angkatan kerja sehingga cenderung akan meningkatkan pengangguran walaupun kenaikannya belum signifikan.

Adapun data yang menggambarkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel : 2  
Penyerapan Tenaga Kerja (%)  
Tahun 2001 – 2005

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	4,05	5,06	3,25	3,69	3,42
Industri	12,49	10,09	9,39	8,46	8,16
Perdagangan	33,97	36,09	31,21	38,18	38,38
Komunikasi	9,22	9,63	12,41	9,98	9,71
Jasa-jasa	32,62	30,26	31,44	32,97	32,64

Sumber : Analisis Situasi Pembangunan

*Manusia Kota Madiun Tahun 2005*

Dari data di atas, sektor perdagangan yang berada di urutan ketiga dalam memberikan sumbangan kepada PDRB, menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 33,97% tahun 2001 dan 38,38% tahun 2005 atau kenaikan rata-rata 3,89% pertahun. Sedangkan sektor jasa-jasa yang berada di urutan kedua dalam memberikan sumbangan kepada PDRB menyerap tenaga kerja yaitu 32,62% tahun 2001 dan 32,64% tahun 2005 atau rata-rata kenaikan 0,13% pertahun.

Dengan demikian sektor perdagangan menyerap angkatan kerja paling besar, dengan pertumbuhan daya serap terhadap angkatan kerja setiap tahunnya meningkat cukup signifikan.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Kota Madiun pada dasarnya selalu ditetapkan sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian Barat. Pusat pengembangan itu mencakup pula sebagai pusat perdagangan skala regional SWP yang berdasar pada potensi sektor ini untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerah/kabupaten sekitar.

Namun demikian kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan perdagangan masih berkecenderungan memusat di pusat kota dan umumnya belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai, semisal area parkir yang proporsional. Dari sisi *supply* dan *demand* termasuk tingkat harga, sektor perdagangan di Kota Madiun masih belum proporsional memenuhi kebutuhan daerah-daerah sekitar sehingga kecenderungan pemanfaatan pusat-pusat perkulakan langsung di Surabaya, Surakarta, bahkan Bandung dan Jakarta oleh pedagang daerah sekitar masih sangat tinggi. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Madiun tahun 2002 - 2012 ditegaskan bahwa pengembangan perdagangan antara lain akan diorientasikan pada pengembangan skala regional yang skala pelayanannya mencakup SWP. Pengembangan itu mencakup pula penataan kawasan perdagangan dan fasilitas pendukungnya dan mengarahkannya ke wilayah-wilayah kota yang belum optimal perkembangannya.

Industri yang berkembang di Kota Madiun utamanya adalah industri pengolahan skala kecil dan menengah yang mencakup berbagai jenis antara lain industri bahan pangan, sandang, bahan bangunan, alat-alat rumah tangga dan industri lainnya. Data perkembangan industri kecil dan menengah lima tahun sebagai berikut :

Tabel : 3  
Perkembangan industri kecil dan menengah  
Tahun 2001-2005

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah industri :	2.525	2.540	2.557	2.577	2.592
-Industri formal	318	325	332	338	346
-Industri non formal	2.207	2.215	2.225	2.239	2.246
Nilai produksi (jt-an rp)	18.157,07	19.275,02	19.797,51	20.320,54	20.818,57

Sumber data : Disperindata (diolah).

Ditinjau dari keberadaan industri kecil dan menengah tersebut lokasinya masih banyak yang menyebar dan bercampur dengan kawasan permukiman. Meskipun demikian sesungguhnya keberadaannya secara sederhana bisa diklasifikasikan pada potensinya dalam menimbulkan gangguan dan tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan. Selama ini sudah ditempuh upaya untuk mengumpulkan industri kecil sejenis dalam sentra-sentra industri kecil. Hal ini antara lain untuk meminimalisir gangguan pada lingkungan. Namun demikian yang tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan juga diarahkan penataannya untuk bisa tersentral dalam satu lingkungan industri.

Untuk industri besar tertentu sesungguhnya sudah disiapkan kawasan disekitar PG. Rejoagung, namun belum bisa berkembang optimal karena berbagai kendala.

Koperasi di Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 232 unit dan 1 KUD, pada tahun 2005 berkembang menjadi 249 unit dan 1 KUD. Volume usaha pada tahun 2000 Rp 1.525.269.000.000,00 tahun 2005 volume usaha Rp 86.779.910.000,00. Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2000 sebesar Rp 2.914.000.000,00 pada tahun 2005 sebesar Rp 4.872.930.000,00.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan katup pelepas masalah ketenagakerjaan yang kontribusinya sangat signifikan. Pada kurun waktu yang masih diwarnai krisis, keberadaan mereka tetap bertambah secara signifikan yang tercermin dari banyaknya pencari kerja yang tertampung. Jumlah UMKM di Kota Madiun tahun 2001 sebanyak 20.871 unit. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 21.044 unit pada tahun 2005. Perkembangan UMKM dalam waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

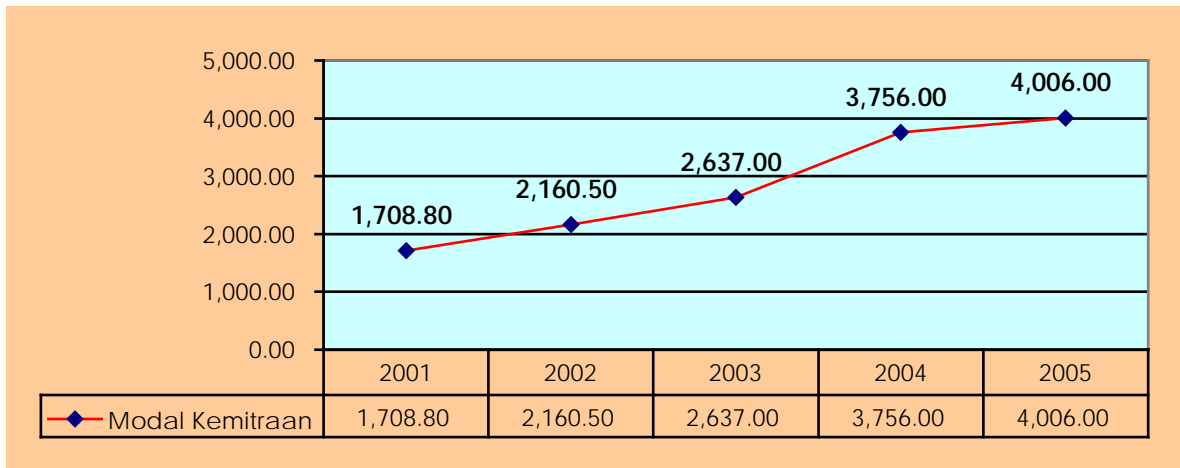
Tabel : 4  
Perkembangan Usaha Mikro Kecil & Menengah  
Tahun 2001-2005

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
Menengah	352	355	360	368	377
Kecil	2.684	2.756	2.285	2.292	2.301
Mikro	17.834	17.879	17.965	18.135	18.366
Jumlah	20.871	20.990	21.210	20.795	21.044

Sumber : Data diolah

Demikian juga dalam rangka memberikan akses permodalan kepada usaha menengah kecil dan mikro telah dilaksanakan kemitraan usaha melalui bantuan modal sebagai berikut :

Gambar : 10  
Perkembangan Modal Kemitraan UMKM  
Tahun 2001 - 2005



Sumber : Data diolah

Mengingat tingkat ketahanan UMKM dalam menghadapi krisis dan kemampuannya dalam menampung barisan pencari kerja, maka keberadaannya tidak bisa dibiarkan tumbuh tanpa perencanaan untuk mengintegrasikannya sebagai salah satu potensi ekonomi kota.

Pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan tanah untuk perumahan, serta aktivitas pembangunan infrastruktur merupakan penyebab utama penurunan luas areal pertanian, terutama untuk pertanian yang bersifat tradisional. Penurunan luas areal lahan pertanian di Kota Madiun apabila diambil angka rata-ratanya adalah sekitar 2 hektar setiap tahun. Pada tahun 2001 luas areal lahan pertanian masih sekitar 2.603 hektar, sampai pada tahun 2005 luas areal lahan pertanian menjadi sekitar 2.590 hektar. Berkaitan dengan perkembangan ini, untuk pembangunan pertanian kedepan diarahkan pada pengembangan agrobisnis yang antara lain mencakup kegiatan distribusi hasil pertanian, penyediaan saprodi, pengolahan paska panen dan kegiatan lainnya yang skala pelayanannya mencakup SWP.

Sampai dengan perkembangannya pada saat ini potensi wisata Kota Madiun masih berhubungan dengan posisi Kota Madiun sebagai kota transit dan sekaligus pusat SWP. Hal ini nampak dari hasil analisa potensi pariwisata dalam RTRW Kota Madiun Tahun 2002 – 2012 yang menyebutkan bahwa potensi terbesar pariwisata Kota Madiun terletak pada pusat pelayanan sarana wisata terutama pada akomodasi wisata, perbelanjaan, fasilitas bank, *money changer*, biro perjalanan, hotel, restoran dan makanan khas untuk buah tangan. Meskipun dalam keterbatasan potensi tersebut namun total angka kunjungan wisata selama kurun lima tahun terakhir menunjukkan trend yang positif.

Data berikut ini menggambarkan angka kunjungan wisata dari wisatawan domestik maupun mancanegara selama kurun waktu dari tahun 2001 sampai tahun 2005.

Tabel : 5  
Kunjungan wisata  
Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
Wisatawan Nusantara	71.042	68.527	108.665	219.044	107.584
Mancanegara	514	1.500	412	168	30
Jumlah	71.556	70.027	109.077	219.212	107.614

Sumber : Data diolah

Dari analisa terhadap kondisi eksisting aspek kepariwisataan Kota Madiun bisa digambarkan bahwa terdapat beberapa potensi obyek wisata yang sangat mungkin untuk dikembangkan antara lain wisata belanja, wisata pendidikan dan budaya, wisata olah raga, dan wisata rekreasi. Wisata belanja berkait erat dengan konsep *City Tour* yang berupa paket tour berdurasi jam dengan obyek pusat belanja dan dikembangkan obyek lain baik berupa pasar tradisional maupun atraksi wisata buatan. Wisata pendidikan mencakup obyek yang bisa dijadikan bahan penambah wawasan seperti pabrik gula peninggalan kolonial, PT INKA, situs sejarah kota dan sebagainya. Wisata olahraga adalah memaksimalkan event-event olahraga yang dukungan fasilitasnya sudah relatif modern dan variatif di Kota Madiun. Serta wisata rekreasi dengan memaksimalkan ruang-ruang terbuka dan sarana rekreasi terbangun agar tersebar di seluruh kota.

## Tantangan

Tantangan untuk meningkatkan perekonomian Kota Madiun 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan PDRB melalui investasi sektor swasta, pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah secara umum.
- b. penerapan kebijakan-kebijakan publik di bidang ekonomi yang bisa seluas mungkin menampung pertumbuhan tenaga kerja.
- c. pengembangan fasilitas dan pusat pelayanan perdagangan yang mampu memenuhi *supply* dan *demand* Kota Madiun dan daerah hinterland sekitarnya;
- d. memberikan fasilitasi kawasan, manajerial, modal dan akses pasar untuk industri kecil dan menengah yang kontribusinya untuk penyerapan tenaga kerja sangat signifikan;
- e. menyusun pola yang jelas untuk pengembangan industri sedang dan besar mencakup jenis industri, penyerapan tenaga kerja, dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup.
- f. pengelolaan Koperasi dan UMKM yang sinergis dan diintegrasikan dalam sistem perekonomian kota dengan memfasilitasi pertumbuhannya untuk menjadi salah satu potensi ekonomi sejajar dengan potensi ekonomi yang lainnya.
- g. penyusunan rencana yang komprehensif serta program-program yang berdasar pada analisa yang memadai terhadap potensi pariwisata dan rencana pengembangannya sebagai potensi pendapatan daerah.
- h. prioritas pembangunan pertanian pada agrobisnis dengan skala pelayanan tingkat SWP.

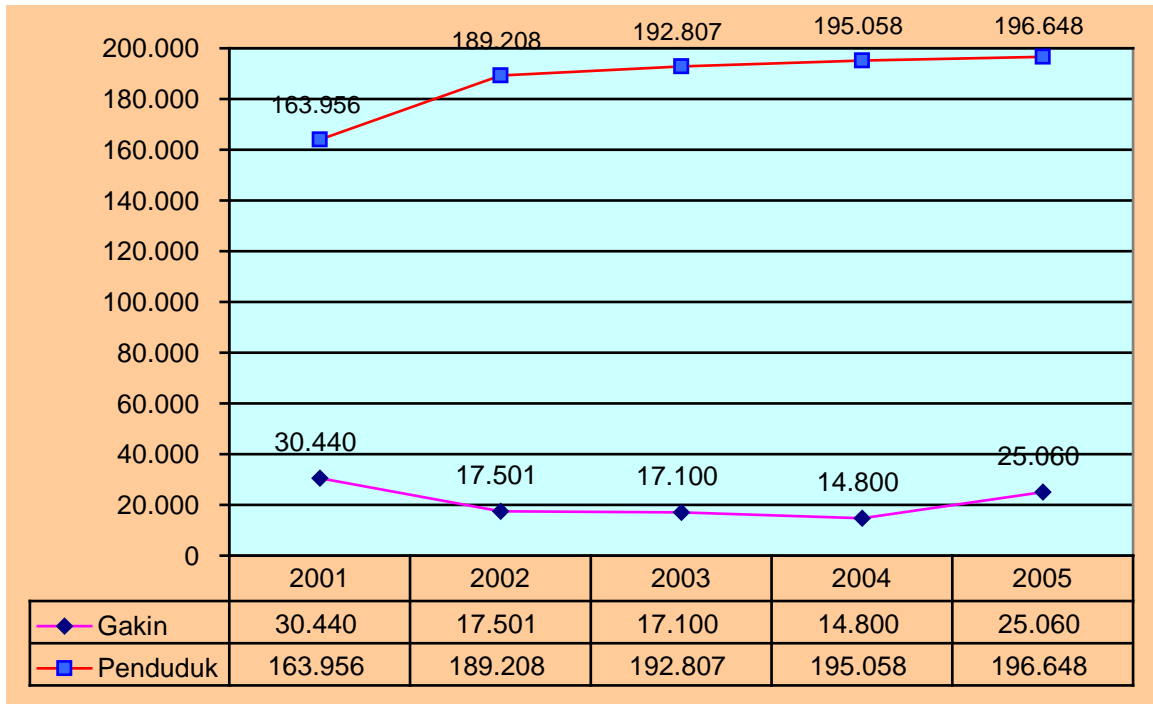
## E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMISKINAN

Problem kemiskinan merupakan problem yang cakupannya masih bertaraf nasional, sehingga penanganannya juga melibatkan pendekatan yang bersifat nasional disamping yang bersifat lokal. Secara nasional salah satu program untuk meminimalisir masalah kemiskinan adalah PMDMK (Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan).

Secara filosofis program tersebut mengasumsikan bahwa setiap penanganan masalah kemiskinan harus dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, meskipun terkadang asumsi ini menafikkan bahwa bisa terjadi kemiskinan merupakan anak persoalan yang ditimbulkan justru oleh suatu kebijakan. Data dan uraian berikut akan menjelaskan hal tersebut.

Data kemiskinan dari tahun 2001 sampai tahun 2005 di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Gambar : 11  
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Madiun  
Tahun 2001-2005



Sumber : Data diolah

Dari gambaran data tersebut tercermin bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diambil di tingkat Kota Madiun. Kebijakan nasional tentang harga BBM sebagai contoh, sangat berpengaruh dalam menaikkan tingkat kemiskinan karena mempunyai korelasi langsung dengan melemahnya daya beli masyarakat. Salah satu upaya untuk menangani masalah tersebut adalah upaya yang intensif menurunkan tingkat kemiskinan secara komprehensif dan terus-menerus melalui upaya pemberdayaan masyarakat.



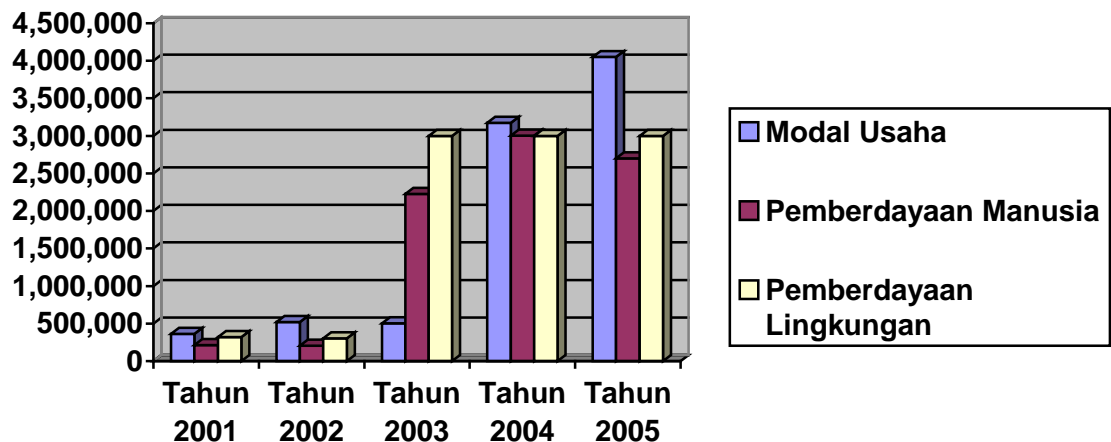
Dalam upaya memberdayakan masyarakat telah diterbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan (PMDMK), melalui Tridaya, yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan yang diterimakan langsung oleh masyarakat lewat kecamatan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun secara keseluruhan sudah dialokasikan dana sebesar Rp. 26.579.000.000,- untuk membeayai kegiatan-kegiatan PMDMK.

Tabel : 6  
Perkembangan anggaran yang telah dipergunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Tahun 2001-2005 (dalam ribuan)

Kegiatan	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005
Modal Usaha	364.500	519.800	504.500	3.171.775	4.050.000
Pemberdayaan Manusia	212.400	204.100	2.228.225	3.002.100	2.700.000
Pemberdayaan Lingkungan	318.600	303.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>J u m l a h</b>	<b>895.500</b>	<b>1.026.900</b>	<b>5.732.725</b>	<b>9.173.875</b>	<b>9.750.000</b>

Sumber data: Bappeda Kota Madiun.

Gambar : 12  
Perkembangan anggaran yang telah dipergunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



## **Tantangan**

Tantangan terbesar dalam mengelola masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi yang melemahkan daya beli masyarakat serta menciptakan pola yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

## **F. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **1. Air Tanah**

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Kota Madiun, kebutuhan akan air bersih untuk berbagai keperluan menjadi semakin meningkat. Sejalan dengan hal itu peranan air tanah juga dirasakan semakin penting sebagai sumber pasokan air bersih untuk memenuhi berbagai keperluan lain dan menunjang kelangsungan pembangunan. Dominasi penggunaan air tanah adalah untuk kebutuhan air bersih dan irigasi. Konsumsi air tanah untuk air bersih meningkat setiap tahun. Pada tahun 2005 konsumsi air bersih mencapai 9.041.620 m<sup>3</sup>. Rata-rata pertumbuhan jumlah pelanggan air minum PDAM selama kurun waktu 2000-2005 adalah 4,85%/tahun yang mengakibatkan konsumsi air bersih meningkat pesat. Konsumsi air untuk pertanian juga merupakan konsumsi dominan.

Saat ini kebanyakan lahan pertanian di Kota Madiun mendapatkan suplai air untuk irigasi dari sumur pantek secara mekanis tidak lagi mengandalkan saluran irigasi. Seiring penyusutan luas lahan pertanian yang pada tahun 2005 luasnya 1105 ha cenderung menyusut sekitar 0,45% pertahun, konsumsi air tanah untuk irigasi juga mengalami penyusutan. Kebutuhan terhadap air bersih di kota pada dasarnya tidak hanya untuk minum sebagai kebutuhan pokok tetapi juga mulai bertambah fungsi antara lain untuk mandi, cuci mobil, restoran, hotel, serta untuk kegiatan industri, dan lain sebagainya.

Potensi air tanah Kota Madiun termasuk dalam wilayah cekungan air bawah tanah Madiun meliputi wilayah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Wonogiri dan Kota Madiun.

Dalam menjaga ketersediaan air tanah dihadapkan pada beberapa permasalahan dan dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain kebiasaan penggunaan air yang tidak hemat. Sedangkan faktor eksternal antara lain penggundulan hutan yang sangat berpengaruh dan hal ini cenderung meningkat.

### **Tantangan**

Tantangan untuk tetap menjaga kapabilitas pemenuhan air tanah adalah :

- a. tantangan utama dalam pengelolaan air bawah tanah adalah mempertahankan keseimbangan air bawah tanah yaitu dengan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam memotivasi masyarakat hinterland untuk mempertahankan hutan, mengembangkan kawasan dan sumur-sumur resapan untuk tangkapan air, mengendalikan pemanfaatan air tanah agar lebih efisien dan efektif.
- b. pengelolaan yang proporsional terhadap keberadaan sumber air tanah termasuk faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk menjaga kelestariannya.
- c. membudayakan sikap dan cara pemanfaatan air bersih yang hemat.

## **2. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau kawasan dan jalur hijau. Secara umum ruang terbuka hijau didominasi kawasan pertanian dengan luas 35% terhadap luas kota. Penyusutan ruang terbuka hijau khususnya lahan pertanian cukup nyata terlihat dari pesatnya pembangunan perumahan masal oleh *developer* ditambah lagi adanya pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Disamping itu pertumbuhan jumlah penduduk Kota Madiun adalah 0,65%/tahun atau rata-rata dalam satu tahun bertambah 1.374 jiwa membawa konsekuensi pertambahan kawasan permukiman. Satu hal yang penting dalam hal ini adalah adanya potensi konversi lahan secara terus menerus.

Dalam konteks ruang terbuka hijau yang menjadi tujuan utama dari keberadaan ruang terbuka hijau adalah fungsinya untuk mempertahankan kualitas komponen lingkungan yaitu sebagai paru-paru atau filter udara, dan mempertahankan kandungan air tanah.

Konversi lahan sebagai konsekuensi perkembangan kota tidak dapat dicegah atau dihentikan namun yang penting adalah dalam konversi lahan tersebut tetap dipertahankannya fungsi ruang terbuka hijau seperti sediakala sebelum dibangun walaupun dalam bentuk yang berbeda.

## **Tantangan**

Tantangan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau antara lain :

- a. mempertahankan fungsi perlindungan pada kawasan non budidaya dan mengembangkan ruang terbuka hijau.
- b. pengelolaan peruntukan tanah terutama di pusat kota agar tidak hanya cenderung dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi.
- c. pembentukan kesadaran terhadap fungsi ruang terbuka hijau dikalangan masyarakat.

### **3. Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan di perkotaan pada umumnya disebabkan oleh banyak sumber dan sangat bervariasi terutama dari sektor jasa maupun industri. Berdasarkan pemantauan lapangan diperoleh fakta bahwa sebagian besar (90%) industri kecil dan rumah tangga dijalankan oleh pengusaha kecil dan menengah antara lain perusahaan tahu, tempe, kecap, peralatan logam, dan lain-lain. Kemampuan modal yang terbatas menjadikan pelaku usaha lebih menekankan pada aspek produksi. Kebanyakan pencemaran lingkungan dari sektor industri berada pada industri kecil karena tidak memiliki unit pengolah limbah. Kalaupun ada instalasi pengolah limbah yang dimiliki sangat sederhana dan tidak optimal dalam mereduksi polutan dan seringkali tidak difungsikan dengan teratur, dan benar sehingga potensi pencemarannya cukup tinggi. Lain halnya dengan industri berskala besar, potensi pencemaran telah diupayakan pengendaliannya melalui unit pengolah limbah yang dioperasikan dengan standar operasi tertentu.

Disamping dari sektor industri, sektor jasa pun juga berpotensi menimbulkan pencemaran antara lain jasa hotel atau penginapan yang mengeluarkan limbah cair dari *laundry*, jasa rumah sakit yang mengeluarkan limbah medis, dan lain sebagainya. Pada sektor jasa yang berskala kecil atau rumah tangga sebagaimana yang terjadi di sektor industri kebanyakan tidak memiliki unit pengolah limbah karena keterbatasan modal, keuntungan yang dirasa kurang akibat biaya produksi yang cukup besar apabila disertai dengan unit pengolah limbah, dan perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan kesehatan lingkungan.

## **Tantangan**

Tantangan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan adalah :

- a. mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pembentukan kesadaran kepada sumber-sumber potensi pencemaran.
- b. penyusunan dan penerapan regulasi yang proporsional untuk masalah pencemaran lingkungan.
- c. membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui mekanisme yang jelas dan proporsional.

## **4. Persampahan**

Pada tahun 2005 produksi sampah total penduduk Kota Madiun adalah 491m<sup>3</sup>/hari dengan asumsi bahwa produksi sampah perorang perhari di Kota Madiun adalah 2,5 liter/orang/hari atau sama dengan 0,0025m<sup>3</sup>/orang/hari. Pada tahun 2005 produksi sampah total penduduk Kota Madiun adalah 491m<sup>3</sup>/hari sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan 560m<sup>3</sup> perhari hal ini menunjukkan adanya peningkatan beban kota dibidang kebersihan khususnya persampahan. Saat in kapasitas seluruh TPS di Kota Madiun adalah sebesar 32 unit, yang masing-masing mampu diisi 2 container berkapasitas 8 m<sup>3</sup> per container, belum termasuk yang ada di pasar-pasar. Jumlah armada pengangkut kontainer dari TPS yang masuk ke TPA rata-rata adalah 35 rit/hari. Sehingga diperkirakan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebanyak 280m<sup>3</sup>/hari. Sampah tersebut adalah sampah rumah tangga belum termasuk yang dari pasar, perkantoran, pabrik, hotel dan lain sebagainya, yang diangkut secara langsung ke TPS.

Secara matematis untuk area seluas 1 Ha diperlukan waktu sekitar 2 tahun hingga mencapai penuh sehingga untuk waktu 20 tahun mendatang diperkirakan membutuhkan lahan TPA seluas 10 Ha. Namun demikian terdapat beberapa jenis sampah yang dapat diambil untuk didaur ulang antara lain plastik khususnya plastik kemasan air minum, kaleng logam, dan lain sebagainya.

Di Kota Madiun terdapat 2 Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yaitu TPA Pilangbango dan TPA Winongo. TPA Pilangbango saat ini sudah penuh dan sudah tidak dioperasikan lagi sejak tahun 1997, sedangkan TPA Winongo saat ini sudah mendekati penuh dan sangat mendesak untuk dicarikan tempat pengganti.

Metode pengolahan sampah yang diterapkan adalah *open dumping* sehingga sangat cepat memakan tempat karena tidak ada reduksi volume sampah. Diperlukan pengembangan metode pengolahan sampah yang mampu mereduksi sampah semaksimal mungkin.

Seiring dengan perkembangan teknologi, teknik pengolahan sampah juga mengalami perkembangan baik yang bertujuan untuk mendaur-ulang maupun untuk penghancuran. Masalahnya adalah teknologi tersebut masih mahal dan memerlukan keahlian dan kedisiplinan kerja yang tinggi.

Dari sisi perilaku masyarakat dalam hal pembuangan sampah diketahui bahwa selama ini masyarakat membuang sampah dalam keadaan bercampur antara sampah organik dengan sampah non organik. Keadaan ini kurang menguntungkan dalam pengembangan metode pengelolaan sampah khususnya untuk daur ulang maupun penghancuran.

### **Tantangan**

Tantangan pengelolaan persampahan ke depan adalah :

- a. pada jangka pendek yang mendesak adalah mencari tanah pengganti TPA Winongo yang sudah tidak mungkin berfungsi maksimal.
- b. mengembangkan alternatif teknik pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga sampai di TPA.
- c. meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah.

## **5. Permakaman**

Dari tahun 1995 hingga tahun 2005 jumlah kematian penduduk tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dan rata-rata 1228 jiwa setiap tahun. Apabila diprosentasekan terhadap jumlah penduduk maka terdapat penurunan persentase kematian terhadap jumlah penduduk hal ini disebabkan karena kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat sudah mulai membaik.

Keadaan makam yang ada di Kota Madiun sebagian besar sudah mendekati penuh. Jumlah makam di Kota Madiun yang tersebar di kelurahan-kelurahan sebanyak 72 lokasi dengan total luas 22,48 Ha. Sebagian besar sudah mendekati penuh bahkan ada yang sudah penuh.

Permasalahan yang sangat sering sekali muncul dalam pengembangan makam umum adalah ketersediaan lahan. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengadaan tanah untuk makam terutama pada persepsi masyarakat terhadap makam. Makam dipersepsikan sebagai tempat yang "angker", menyeramkan, dan tidak boleh dijamah.

Keadaan makam kebanyakan adalah kotor, tidak teratur, tidak tertata, tidak terawat, kurang tersedia ruang gerak, kurang tersedia fasilitas, kurang penerangan dan dikelola sangat sederhana. Persepsi tersebut ditambah lagi dengan kondisi fisik makam pada umumnya mengakibatkan masyarakat tidak mau berada dekat makam, karena disamping mengurangi kenyamanan juga berdampak ekonomi yaitu harga tanah di sekitar makam menjadi lebih rendah dibanding yang jauh dari makam. Kemungkinan upaya pengadaan tanah untuk makam umum oleh pemerintah daerah dalam waktu mendatang masih akan menghadapi kendala-kendala tersebut.

Pada kenyataannya saat ini di Kota Madiun masih banyak kawasan terbuka yang layak dipergunakan untuk makam khususnya di kawasan pinggiran kota.

### **Tantangan**

- mengembangkan konsep bahwa lahan dan bangunan pemakaman merupakan bagian dari lanskap yang bisa mendukung keindahan kota, sehingga penataannya memerlukan konsep yang jelas termasuk kebutuhan dan pengadaan lahannya.

## **G. Tata Ruang**

Kota Madiun terletak di bagian Barat Provinsi Jawa Timur mempunyai lokasi keruangan yang cukup strategis di persimpangan yang dilewati oleh jalur transportasi darat dengan lingkup primer yaitu jalan yang menghubungkan Kota Surabaya - Madiun - Jakarta dan dilewati jalur Kereta Api Surabaya - Madiun - Jakarta dan Surabaya - Madiun - Bandung. Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun ditetapkan sebagai Kota Orde II B sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi. Dengan kondisi tersebut menempatkan bahwa Kota Madiun mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam men"generate" wilayah barat Provinsi Jawa Timur.

Struktur ruang kota di Kota Madiun dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1986 Kota Madiun terbagi menjadi 2 (dua) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu BWK Utara dan Selatan dan selanjutnya peraturan tersebut telah dievaluasi dan direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 1993/1994 - 2003/2004 yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2002 - 2012. Dalam kedua peraturan daerah tersebut struktur ruang Kota Madiun telah berkembang menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota yaitu BWK Pusat Kota (P), BWK Barat (B), BWK Utara (U) dan BWK Selatan (S). Dari keempat BWK tersebut baru BWK P yang sudah terbentuk sedangkan untuk BWK U dan S baru berkembang sekitar tahun 2002 masing-masing terletak disekitar Pasar Srijaya dan Kawasan Jl. Serayu dan Jl. Salak. Pada dasarnya pembentukan struktur ruang tersebut adalah untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan di luar pusat kota sebagai upaya penyebaran pelayanan dan mengurangi terkonsentrasinya kegiatan di pusat kota, dengan demikian pusat-pusat pelayanan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya kedepan harus diperkuat, diantaranya melalui pembangunan infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pola penggunaan tanah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yakni kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Konversi lahan dari pertanian menjadi non pertanian terjadi sangat pesat, hal ini terjadi terutama pada kawasan transisi dan pinggiran. Sedangkan di pusat kota karena hampir seluruhnya merupakan lahan terbangun, perkembangan kota diindikasikan dengan perkembangan secara intensif/vertikal (Ruko) dan penggunaan lahan campuran / *mix use* antara tempat tinggal dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Perkembangan fisik tersebut akan terus berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitasnya, namun disisi lain ketersediaan lahan di Kota Madiun sangat terbatas sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan lahan yang pada akhirnya dapat berdampak pada degradasi lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.



Perkembangan wilayah di Kota Madiun sebelum terjadinya otonomi daerah secara signifikan baru terjadi di Pusat kota dan sekitarnya terutama pada kawasan-kawasan yang telah dilayani oleh jalan arteri dan kolektor sekunder yaitu di BWK P, sebagian BWK U dan sebagian BWK S. Sedangkan di BWK B karena dibatasi oleh Kali Madiun mengakibatkan aksesibilitasnya rendah dan kondisinya relatif belum berkembang. Pada tahun 2002 dilakukan pembangunan ring road Barat dan Jembatan Pajajaran yang menghubungkan BWK B dengan BWK P dan BWK U. Upaya ini memacu perkembangan di BWK B. Kondisi tersebut hampir sama dengan kawasan di Utara rel KA jurusan Surabaya – Madiun – Jakarta, dengan dibatasi oleh rel tersebut maka saat ini aksesibilitas kawasan tersebut ke pusat kota menjadi rendah. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan mengakibatkan kesenjangan perkembangan kota antar bagian wilayah kota yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi. Dengan demikian untuk mengembangkan kawasan tersebut harus ada upaya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitasnya.

## **1. Perkembangan Kawasan Pertanian**

Lahan pertanian di Kota Madiun mayoritas terdapat di daerah pinggiran kota tepatnya di bagian Utara dan Barat kota serta sebagian kecil di bagian Selatan dengan luas keseluruhan pada tahun 2005 sekitar 1105 Ha atau 35% dari luas keseluruhan Kota Madiun dengan lokasi tersebar tetapi yang dominan terletak dipinggiran kota.

Lahan sawah yang ada hampir seluruhnya merupakan sawah teknis yang produktif, jika melihat perkembangannya dari tahun ke tahun maka luas lahan pertanian ini semakin menyusut. Karenanya perubahan fungsi lahan pertanian untuk kawasan terbangun di wilayah kota perlu mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan sesuai dengan adanya surat edaran Mendagri No. 590/11108/SJ tanggal 24/10/1984. Disisi lain memperhatikan fungsi Kota Madiun sebagai wilayah perkotaan dan pusat Satuan Wilayah Pengembangan Madiun dan sekitarnya maka potensi perkembangan fisik pada tahun-tahun mendatang cenderung sangat pesat. Kondisi tersebut jika sama-sama dipertahankan akan menjadi hambatan terlaksananya pembangunan di Kota Madiun, untuk itu perlu dipertahankan lahan pertanian pada wilayah-wilayah tertentu yaitu :

- Di sebelah Selatan : sawah Demangan, Josenan dan Kuncen.
- Di sebelah Barat kota : sawah Kejuron, sawah Pangongangan.

## 2. Perkembangan Kawasan Permukiman

Perkembangan kawasan permukiman terutama pembangunan perumahan di Kota Madiun mengalami perkembangan yang pesat sekitar tahun 1990-an, hal ini disebabkan makin membaiknya perekonomian setelah sebelumnya mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1997. Pada tahun 2005 jumlah rumah di Kota Madiun sebanyak 34.790 unit rumah dan pada tahun 2025 dengan proyeksi jumlah penduduk sekitar 212.784 jiwa dan dengan asumsi 1 rumah ditempati 4 jiwa maka kebutuhan rumah diprediksikan sebanyak 53.196 unit. Pada awalnya jenis perumahan yang berkembang di Kota Madiun adalah perumahan yang berkembang sejak jaman Belanda dan tertata dengan baik dan berciri khas yang ditampakkan pada pola arsitektur Belanda dengan bangunan yang kokoh dan kapling rumah sedang - besar dengan lingkungan yang baik. Di pusat kota yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi untuk aktivitas ekonomi menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bekerja dan bertempat tinggal di kawasan tersebut sehingga kepadatan permukiman di kawasan itu tinggi dan menjadi perkampungan dengan pelayanan utilitas yang kurang memadai. Kawasan ini secara intensif masih berkembang sampai saat ini.

Pada tahun 1990-an di Kota Madiun mulai berkembang perumahan formal yang dibangun oleh developer, perumahan ini lokasinya tersebar di pinggiran kota tetapi mempunyai aksesibilitas yang memadai. Pada kawasan ini kondisi bangunan dan lingkungannya sudah memadai karena sudah direncanakan sebelumnya, selain itu prasarana penunjangnya juga tersedia, dengan demikian dalam pembangunan perumahan formal ini secara umum sangat membantu pemerintah dalam pengadaan rumah namun hal ini harus disertai dengan pengendalian penyediaan fasilitas umum dan sosialnya diantaranya adalah penyediaan makam.

Di wilayah pinggiran berkembang perumahan non formal (swadaya) dengan kondisi yang beragam, kepadatan bangunannya relatif rendah, dan prasarana penunjangnya kurang. Pada kawasan ini relatif baik untuk pengembangan kawasan permukiman di masa mendatang karena ketersediaan ruang yang cukup.

Adanya fakta bahwa distribusi persil di Indonesia sangat tidak teratur berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan tanah yang tidak adil, tidak efisien dan tidak efektif, penyediaan fasilitas umum dan sosialnya sehingga perlu dilakukan model pengaturan dan penataan lahan. Disamping pengadaan rumah tersebut, penanganan rumah tidak layak huni terutama di kawasan kumuh dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Perkembangan Kawasan Industri**

Jenis industri yang terdapat di Kota Madiun terdiri dari industri besar, menengah dan kecil, dengan lokasi yang tersebar dan tidak terkonsentrasi di satu lokasi tertentu sehingga yang merupakan kawasan industri adalah berupa kawasan industri besar. Adapun jenis-jenis industri yang berkembang di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Industri Kereta Api Madiun (INKA)
- b. Industri Pabrik Gula Rejoagung
- c. Industri rokok di Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo
- d. Industri pembuatan kecap di Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo
- e. Logam dan karoseri
- f. Meubel dan alat rumah tangga di Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
- g. Industri susu murni di Jalan Agus Salim dan Jl. A.Yani
- h. Industri kecil dengan lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan Kota Madiun seperti : pembuatan sambel pecel, roti, suun, tahu, kerupuk
- i. Pergudangan di sepanjang Jl. Ponorogo, Jl. MT. Haryono, Jl. Diponegoro, Jl. Basuki Rahmad

Keberadaan industri besar/menengah pengelolaan limbahnya sudah memenuhi standar yang ditentukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan, namun sebagai antisipasi perkembangan kota ke depan yang semakin pesat maka keberadaan industri menengah/besar beserta pergudangannya terutama yang terletak di tengah kota akan sangat mengganggu aktivitas kehidupan kota, diantaranya akan menimbulkan kemacetan.

Sedangkan untuk industri kecil dengan lokasi yang tersebar mengikuti rumah tangga yang ada, berpotensi menimbulkan limbah karena pengelolaan limbahnya masih sangat sederhana dan kurang memenuhi standar yang ditentukan, hal ini sangat berpotensi menimbulkan polusi lingkungan seperti bau yang pada akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan.

#### **4. Perkembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Pelayanan kegiatan Perdagangan di Kota Madiun meliputi pasar dengan lingkup regional, menengah maupun kelurahan, mall, minimarket, pertokoan, warung dan lain – lain yang saat ini secara umum telah tersedia sesuai dengan kebutuhan dengan lingkup pelayanannya. Melihat distribusinya, lokasi fasilitas perdagangan yang ada saat ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Dalam lingkup pelayanannya fasilitas perdagangan tersebut dapat dibedakan menjadi :

- a. perdagangan skala menengah, mempunyai skala pelayanan wilayah dan biasanya dilayani oleh pasar skala wilayah dan pertokoan.
- b. perdagangan eceran, umumnya dilayani oleh toko atau warung.

Dilihat dari sebaran lokasinya fasilitas pasar yang ada sudah terdistribusi merata di seluruh Kota Madiun sesuai dengan lingkup layanannya untuk kawasan perdagangan dan jasa di Kota Madiun, dan saat ini perkembangan rumah toko/ruko cenderung meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Madiun adalah berpola linier di sepanjang jalan-jalan utama kota. Dengan adanya pola yang demikian maka perlu diantisipasi terjadinya pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menimbulkan masalah spasial lainnya, misalnya kemacetan lalu lintas akibat tingginya bangunan yang timbul dari penggunaan tanah yang ada. Adapun kawasan perdagangan dan jasa di Kota Madiun, yaitu di :

- a. sepanjang Jl. Agus Salim - Jl. Panglima Sudirman
- b. sepanjang Jl. Kol. Marhadi - Jl. Urip Sumoharjo
- c. sepanjang Jl. Cokroaminoto
- d. sepanjang Jl. Musi
- e. sepanjang Jl. Mayjen. Sungkono
- f. sepanjang Jl. Trunojoyo

Disamping itu ada beberapa pusat perbelanjaan/plasa yang letaknya tersebar, yaitu :

- a. Plasa Sri Ratu dan Matahari Department Store di Jl. Pahlawan
- b. Plasa Presiden di Jl. Pang. Sudirman

## **5. Perkembangan Kawasan Pendidikan**

Untuk kawasan pendidikan di Kota Madiun ada beberapa kawasan yang merupakan kumpulan dari beberapa fasilitas pendidikan. Umumnya kawasan pendidikan ini berkembang di kawasan pusat kota, baik itu fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, antara lain di sekitar Jalan Mastrip dan Jalan Sudirman yang terdiri dari fasilitas pendidikan dasar (SD dan SMP, antara lain SDN Klegen 01, SDN Mojorejo, SMPN 4), pendidikan menengah (SMA dan SMK, antara lain SMAN 5, SMAN 1, SMKN 1, SMA Bonaventura, SMA Cokroaminoto), kemudian di sekitar Jalan Nias, Jalan Biliton, Jalan Sumatera, Jalan Jawa, dimana fasilitas pendidikan yang ada antara lain SDN Kartoharjo 01, SDN Madiun Lor 05, SMAN 2. Hanya saja pada saat ini mulai ada upaya penyebaran kawasan pendidikan ke pusat BWK atau wilayah lainnya.

Dalam pengembangan pelayanan fasilitas pendidikan kedepan, dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat terutama di kawasan pinggiran kota, maka apabila aglomerasi fasilitas pendidikan di kawasan pusat kota tetap dipertahankan akan berpotensi timbulnya permasalahan diantaranya tingginya biaya transportasi, kemacetan, kebisingan dan lain-lain, sehingga menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.

## **6. Perkembangan Kawasan Kesehatan**

Distribusi fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Madiun secara umum relatif sudah merata. Untuk lingkup pelayanan kota dan regional, pelayanan kesehatan dilayani oleh fasilitas kesehatan di kawasan pusat kota yaitu di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Biliton dan Jalan Pahlawan, dimana fasilitas kesehatan yang ada yaitu RSUD Dr. Soedono, RS Tentara dan Rumah Bersalin, RS Santa Klara. Untuk pelayanan kesehatan di bagian Selatan kota telah tersedia Rumah Sakit Islam Aisyiah di Jalan Mayjen. Sungkono dan Rumah Sakit Griya Husada di Jl. DI Panjaitan. Untuk melayani bagian Barat kota telah terdapat RSUD Sogaten. Sedangkan untuk wilayah Timur belum terlayani secara optimal.

Kondisi ini mengakibatkan kawasan di bagian Timur Kota Madiun dan wilayah pinggiran kota kurang terlayani, khususnya fasilitas kesehatan yang mampu melayani pasien inap seperti rumah bersalin karena fasilitas kesehatan yang sudah terdistribusi merata adalah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tidak dapat melayani pasien inap. Umumnya perkembangan kawasan kesehatan tersebut diiringi dengan munculnya jenis fasilitas kesehatan lainnya seperti : apotek atau toko obat, laboratorium klinik.

## **7. Perkembangan Kawasan Perkantoran**

Melihat distribusi lokasi kawasan perkantoran di Kota Madiun saat ini relatif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, khususnya untuk kantor pemerintah karena hampir semua lokasi kantor tersebut dilayani oleh jalan arteri dan kolektor sekunder sehingga mempunyai aksesibilitas yang tinggi diantaranya adalah di pusat kota, seperti : Kantor Pemerintah Kota, Kantor Pembantu Gubernur, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Jalan Pahlawan, Kantor Pemerintah Kabupaten di Jalan Aloon-aloon Utara, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Mastrip, sebagian di Jalan Salak, Jl. DI Panjaitan dan Jl. Ponorogo.

Begitu pula dengan kantor swasta, persebarannya saat ini sudah relatif merata sesuai dengan lingkup pelayanannya, namun demikian ada beberapa kantor swasta yang lokasinya terletak di permukiman sehingga sinergitas/korelasi kegiatannya rendah yang pada akhirnya mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan lahan.

### **Tantangan**

Tantangan ketataruangan Kota Madiun adalah :

- a. Lokasi keruangan Kota Madiun yang strategis, sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan dengan mensinergikan potensi internal dengan potensi eksternal wilayah hinterland. Melalui pengembangan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan Madiun dan sekitarnya dari perkembangan ekonomi, Kota Madiun dapat berfungsi sebagai pasar wilayah sehingga aksesibilitas wilayah hinterland dalam melakukan aktivitas ekonomi wilayah menjadi meningkat dan efisien. Dalam lingkup pengembangan wilayah Kota Madiun dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan regional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madiun dan sekitarnya.

- b. Pengendalian penataan ruang sangat diperlukan dalam rangka mengarahkan perkembangan Kota Madiun, hal ini terutama disebabkan karena saat ini permasalahan yang terjadi di Kota Madiun belum terlalu rumit dan kompleks seperti halnya yang terjadi di kota besar. Kondisi tersebut mengakibatkan penataan dan pengaturan Kota Madiun akan relatif lebih mudah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 - 2012.

## **H. SARANA DAN PRASARANA**

### **1. Drainase**

Kondisi drainase kota ditinjau dari topografi Kota Madiun berada ditengah jaringan drainase primer (Kali Madiun) maupun drainase sekunder yaitu Kali Piring, Kali Sono, Kali Catur dan Kali Sumber Batang serta drainase kolektor yang berada ditengah kota yang bermuara ke drainase sekunder.

Sistem drainase kota dibagi menjadi 3 yaitu : Madiun Barat, Madiun Tengah dan Madiun Timur dengan subsistemnya sebagai berikut :

1. Sistem Drainase Madiun Barat subsistemnya yaitu : Subsistem Saluran Winongo, Subsistem Saluran Ngegong, Subsistem Saluran Manguharjo I, Subsistem Saluran Manguharjo II dan Subsistem Kali Precet.
2. Sistem Drainase Madiun Tengah subsistemnya yaitu : Subsistem Saluran Patihan, Subsistem Saluran Madiun Lor, Subsistem Saluran Kartini, Subsistem Saluran Sumber Umis, Subsistem Saluran Nambangan Lor, Subsistem Saluran Nambangan Kidul dan Subsistem Kali Catur.
3. Sistem Drainase Madiun Timur subsistemnya yaitu : Subsistem Saluran Terate, Subsistem Saluran Terate Barat, Subsistem Saluran Terate Timur, Subsistem Saluran Mojorejo – Klegen, Subsistem Saluran Rejomulyo – Kali Maling, Subsistem Saluran Manisrejo dan Subsistem Saluran Piring.

Secara keseluruhan mengikuti *contour* topografi yang ada dengan aliran menuju sungai Madiun, Wilayah Madiun Barat mengalir ke Timur, Wilayah Madiun Timur cenderung menuju ke Utara, sedang Wilayah Madiun Tengah Kota menuju ke Barat, berdasarkan keadaan topografi pengalirannya dibedakan menjadi 2 (dua) sistem yaitu : Drainase sistem pompa kombinnasi gravitasi dan drainase sistem gravitasi.

Dilihat dari kondisi saluran drainase di wilayah Kota Madiun berfungsi pula menampung aliran air hujan maupun air dari limbah domestik non tinja, ada juga sistem drainase yang dimanfaatkan sebagai jaringan irigasi atau sebaliknya dan selebihnya dibuang melalui Kali Madiun.

Apabila terjadi hujan Kali Madiun dalam keadaan banjir besar, maka sebagian pusat kota Madiun yang berada dibawah permukaan air banjir menjadi tergenang karena tidak mampu mengalir secara gravitasi. Hal tersebut diperparah dengan adanya penggundulan hutan didaerah hulu (Kabupaten Madiun), apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama, maka akan menimbulkan aliran permukaan (*Run off*) yang cukup besar dan tidak tertampung oleh dimensi saluran yang ada. Dengan kondisi seperti ini maka akan terjadi genangan pada sawah dan perkampungan maupun lingkungan permukiman perkotaan yang mempunyai elevasi rendah. Adapun kondisi prasarana yang ada juga berpengaruh dalam penuntasan genangan/aliran air diantaranya adalah adanya dimensi saluran yang variable, sedimentasi pada saluran drainase, dan kemampuan pompa air kurang mencukupi sehingga terjadi luapan/genangan air.

Adapun lokasi genangan diantaranya adalah Wilayah Nambangan Kidul, Wilayah Nambangan Lor, Wilayah Kartoharjo, Wilayah Madiun Lor, Wilayah Patihan, Wilayah Manguharjo, Wilayah Winongo, Wilayah Tawang Rejo, Wilayah Oro-Oro Ombo dan Wilayah Sogaten.

Sifat genangan sebagaimana pada wilayah tersebut diatas adalah sifatnya rutin apabila terjadi hujan durasi genangan kurang lebih 3 – 4 jam, kedalaman kurang lebih 30 – 50 cm. Disamping genangan genangan tersebut terdapat genangan yang sifatnya rendah/sesaat, dikarenakan adanya dimensi saluran drainase tersier/kwarter dan gorong gorong yang kurang memadai, lubang lubang drainase ditepi jalan yang masuk ke saluran kurang optimal, itupun perlu adanya penanganan, apabila tidak ada suatu penanganan berdampak pula terhadap prasarana jalan atau prasarana yang lain.



## 2. Air Bersih PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Madiun adalah suatu perusahaan milik Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum diwilayah Kota Madiun untuk memberikan pelayanan air bersih dengan menyelenggarakan pelayanan umum/ jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan bagi perusahaan dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan .

Dengan melalui usaha dan melaksanakan komitmen dengan sebaik-baiknya maka pada akhir tahun 2004 PDAM Kota Madiun telah mencapai kondisi keuangan yang baik ditandai dengan tercapainya *full cost recovery* (pendapatan bisa menutupi seluruh beaya).

Dengan rencana program kedepan pengembangan jaringan dan usaha maka PDAM harus minimal mempertahankan kondisi *full cost recovery* dan lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat khususnya dengan jaminan waktu pengaliran selama 24 jam.

Sementara pemenuhan kebutuhan air bersih PDAM sampai dengan tahun 2004 tingkat cakupan pelayanan sebesar 64,58 % dari jumlah penduduk Kota Madiun, pada tahun 2005 ada peningkatan cakupan pelayanan dari 64,58 % menjadi 66,70 % dari jumlah penduduk di Kota Madiun (196.691 jiwa). Suatu harapan oleh pemerintah pusat dan sebagai tantangan kedepan sebagaimana telah disebutkan didalam Kebijakan dan Strategi Nasional (KSN) pengembangan sistem penyediaan air minum target di masa masa mendatang, seperti perjanjian dalam Sidang Umum PBB serta KTT Bumi 2002 (Johannesburg) bahwa tonggak tercapainya *Millenium Development Goals* (MDGs) penduduk perkotaan terlayani air bersih 69,20 %. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, tahun 2008 seluruh PDAM harus mendistribusikan air bersih menjadi air minum, dalam pencapaian sebagaimana tersebut diatas bahwa Standar Nasional penduduk perkotaan dapat terlayani air bersih dari PDAM sebesar 80 % .

Untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya adalah masih terbatasnya jaringan distribusi, keterbatasan kapasitas produksi air untuk kebutuhan air utamanya pada jam puncak sering terjadi kekurangan suplai air, masih cukup tingginya tingkat kehilangan air, sebagai gambaran pada akhir tahun 2004 kapasitas produksi sebesar 408 l/dt, sedang kebutuhan rata rata sebesar 280 l/dt dan kebutuhan pada waktu jam puncak mencapai 490 l/dt.

### **3. Transportasi**

Pelayanan transportasi Kota Madiun saat ini mencakup transportasi darat. Namun untuk perkembangan ke depan, diharapkan pilihan moda transportasi tidak hanya terpusat pada angkutan jalan raya atau jalan rel, diupayakan adanya alternatif pilihan moda lain yaitu transportasi udara, yang saat ini masih dalam status kepemilikan TNI AU. Secara umum kondisi prasarana transportasi berada dalam keadaan baik dan sedang, baik itu prasarana yang berupa jalan raya, jalan rel, jembatan, sistem terminal, maupun stasiun. Kondisi jalan di Kota Madiun yang berada dalam keadaan baik sepanjang 75,81 % dari total panjang jalan kota yang ada, untuk kondisi jalan yang berada dalam keadaan sedang sepanjang 22,39 %, sedangkan kondisi jalan yang berada dalam keadaan rusak sepanjang 1,94 %. Panjang jalan kota untuk kelas I sepanjang 2,08 % dari total panjang jalan kota, untuk kelas II sepanjang 6,39 %, Kelas III sepanjang 19,08 %, Kelas IV sepanjang 27,91 %, sedangkan Kelas V sepanjang 44,54 %.

Sedangkan untuk sarana transportasi jalan raya di Kota Madiun berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Jawa Timur di Kota Madiun mengalami peningkatan  $\pm 8,71$  % setiap tahunnya. Untuk kendaraan sedan dan sejenisnya pada tahun 2003 sebanyak 1.552 buah, meningkat menjadi 1.580 pada tahun 2004, dan tahun 2005 menjadi 1.826 kendaraan. Kendaraan jeep dan sejenisnya pada tahun 2003 sebanyak 749 kendaraan, tahun 2004 menurun menjadi 736 kendaraan, namun tahun 2005 meningkat menjadi 761 kendaraan. Kendaraan station dan sejenisnya pada tahun 2003 sebanyak 4.145 kendaraan, meningkat menjadi 4.289 kendaraan di tahun 2004, dan 4.722 kendaraan pada tahun 2005.

Kendaraan bus dan sejenisnya pada tahun 2003 sebanyak 300 kendaraan, setahun kemudian kendaraan jenis ini menurun sebanyak 294 kendaraan, namun di tahun 2005 meningkat menjadi 306 kendaraan. Kendaraan truk dan sejenisnya pada tahun 2003 sebanyak 2.791 kendaraan, pada tahun berikutnya menurun menjadi 2.668 kendaraan, namun pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 2.739 kendaraan. Sepeda motor menempati urutan pertama dengan peningkatan yang cukup tajam diantara jenis kendaraan yang lainnya, yaitu sebesar 41.786 kendaraan di tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 43.845 kendaraan, dan pada tahun 2005 menjadi 50.209 kendaraan. Sedangkan alat berat adalah jenis kendaraan yang menempati urutan terendah, yaitu sekitar 49 kendaraan di tahun 2003 dan 29 kendaraan di tahun 2004 dan tahun 2005. Secara garis besar, kendaraan yang ada di Kota Madiun di bedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil pribadi, mikrolet, sepeda motor, mobil dinas, taksi, dan bus umum.
- b. kendaraan tidak bermotor yang terdiri dari cikar, dokar, becak, sepeda dan gerobak.

Peningkatan dan perkembangan sistem transportasi di Kota Madiun dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan peningkatan prasarana dan perencanaan penataan sistem jaringan transportasi serta manajemen lalu lintasnya karena pengembangan sistem transportasi akan mempengaruhi perkembangan wilayah kota di masa yang akan datang, adapun rencana sistem transportasi jalan raya untuk Kota Madiun terdiri atas rencana sistem jaringan jalan, sirkulasi dan rencana angkutan umum.

Permasalahan pada sistem jaringan jalan yang dihadapi saat ini yaitu masih belum mencukupinya jaringan jalan untuk pergerakan regional sehingga jalan-jalan utama di dalam Kota Madiun dibebani oleh lalu lintas antar regional yang padat, sehingga pelayanan ruas jalan pada satu titik terutama pada ruas jalan CBD (*Central Bussines District*) akan terbebani. Jalan pada pusat kota ini akan menjadi tumpuan dari sebagian besar pergerakan yang terjadi di Kota Madiun sehingga potensi kemacetan besar terjadi pada ruas jalan ini.

Sesuai data dari Dinas Perhubungan Kota Madiun tahun 2006, untuk angkutan umum di Kota Madiun saat ini dilayani oleh 10 trayek dengan 89 jumlah angkutan. Namun semakin berkembangnya permukiman yang ada, maka rute yang ada saat ini belum mampu melayani kebutuhan penduduk yang berada pada wilayah yang tidak dilalui angkutan umum. Sehingga pergerakan yang terjadi belum maksimal.

Transportasi jalan rel/kereta api di Kota Madiun dilayani oleh satu buah Stasiun kereta api yang terletak di Jl. Kumpul Sunaryo. Jalur lintasan utama dari kereta api yang ada di Kota Madiun adalah jalur antara Madiun-Jombang-Surabaya-Malang-Banyuwangi dan jalur antara madiun-kearah Barat (Jogya-Bandung-Jakarta), sedangkan jalur lintasan cabang merupakan lintasan yang menghubungkan ke Gudang Perminyakan dan lintasan yang menuju ke industri perkeretaapian (INKA). Sistem transportasi jalan rel di Kota Madiun merupakan sistem transportasi pendukung dari sistem transportasi jalan raya, karena angkutan jalan rel ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat Madiun sebagai alternatif pertama selain menggunakan angkutan jalan raya bagi mereka yang hendak melakukan pergerakan diluar Kota Madiun dalam Pulau Jawa. Untuk itu perlu adanya penertiban garis sempadan untuk keamanan perjalanan kereta api dan masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya, secara teknis masalah lalu lintas pada suatu wilayah dapat digolongkan ke dalam dua cara, yang pertama yaitu dengan menerapkan teknik manajemen lalu lintas yaitu upaya pengendalian dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan melalui penerapan rekayasa lalu lintas misalnya pengembangan jaringan jalan/jalan lingkar, penambahan rute, penambahan sub terminal, penambahan jenis moda transportasi alternatif dan sebagainya. Cara yang kedua dengan menerapkan teknik manajemen jalan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pengaturan struktur tanah.

### **Tantangan**

Tantangan pembangunan sarana prasarana secara agak rinci adalah :

- a. sebagai dasar program kedepan guna mengatasi genangan air/banjir di wilayah Kota Madiun, perlu adanya penyempurnaan/pembenahan dan perbaikan-perbaikan kondisi saluran dan sarana prasarana pelengkap saluran termasuk gorong-gorong sesuai dimensi yang memadai, pendedukan serta penambahan pompa air.

- b. dalam menghadapi masa-masa yang akan datang untuk mendukung upaya menuju Kota Madiun sebagai pusat pengembangan wilayah sekitar sudah barang tentu untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi maupun tingkat layanan air bersih kepada masyarakat Kota Madiun perlu upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan penambahan jaringan-jaringan distribusi air bersih, meningkatkan/mengembangkan cakupan layanan, penambahan sumur sumur pompa, mengganti pompa peninggalan Belanda, menekan angka kebocoran/kehilangan air dan lain lain yang berkaitan dengan air bersih.
- c. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PDAM yang selama ini masih dalam taraf mendistribusikan air bersih harus ditingkatkan menjadi air minum.
- d. untuk mengatasi masalah ruas jalan yang terbebani oleh lalu lintas yang padat akibat peningkatan pergerakan yang terjadi, maka perlu adanya pengembangan jaringan jalan, diantaranya jalan lingkar (*ring road*) Timur maupun Barat. Mengingat pengembangan jalan lingkar ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta dana yang cukup banyak pula, maka untuk sementara pembangunan dilaksanakan pada jalan lingkar Utara - Barat, yaitu mulai dari jalan Urip Sumoharjo hingga tembus ke jalan Yos Sudarso. Pengembangan jaringan transportasi ini diharapkan juga mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk antar kawasan, dan peningkatan keselamatan serta kenyamanan bagi pemakai jalan.
- e. diupayakan pengembangan wilayah pelayanan penambahan rute angkutan umum berupa angkutan kota dan taksi beserta halte dan sub terminal untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam melakukan pergerakan, terutama sub terminal bagian Barat dan Selatan Kota Madiun.  
Namun penambahan angkutan umum juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kapasitas layanan dengan kebutuhan masyarakat, selain itu juga diharapkan dapat menekan peningkatan volume arus lalu lintas serta diperolehnya keseimbangan pendapatan oleh masing-masing operator angkutan umum terhadap biaya operasional yang dikeluarkan.

- f. dalam jangka waktu kedepan, perlu adanya pemikiran mengenai moda angkutan lain sebagai salah satu moda angkutan alternatif, dan juga menunjang keterkaitan antar moda yang satu dengan moda yang lain. Transportasi udara diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan sistem tersebut. Untuk itu Landasan Udara Iswahyudi perlu dikembangkan menjadi landasan yang mampu memberikan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat, khususnya masyarakat disekitar wilayah Madiun, yang perencanaan pengembangan dan teknis pelaksanaannya dilakukan oleh semua pihak yang terkait.
- g. dengan keterbatasan dana Pemerintah Kota Madiun diharapkan adanya dukungan dana dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta dan swadaya masyarakat serta membangkitkan jiwa kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan sampai pemeliharaan sarana prasarana kota.

## **I. POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

### **1. Partisipasi Politik**

Gambaran umum perkembangan partisipasi politik di Kota Madiun menunjukkan bahwa sebelum era reformasi dan seiring meningkatnya taraf hidup dan derajat pendidikan masyarakat, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dalam partisipasi politik, namun saluran yang tersedia pada proporsi tertentu kurang memadai. Terjadinya krisis ekonomi sejak awal Mei 1997 berlanjut menjadi krisis multidimensi secara akumulatif menimbulkan desakan kuat pada tuntutan reformasi. Reformasi politik nasional yang menemukan momentum di tahun 1998, secara monumental diwujudkan dalam pemilu tahun 1999 serta pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden tahun 2004, melalui dua kali perubahan lima undang-undang politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terus dilakukan pembenahan ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta berbagai peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan.

Tingginya dinamika politik dan perlunya konsolidasi dan sinkronisasi ketentuan normatif maka direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti undang-undang sebelumnya. Praktek politik selama sekitar lima tahun memperlihatkan betapa besarnya perubahan politik yang terjadi, partisipasi politik masyarakat yang lebih otonom, independen dan mandiri juga semakin meningkat dan meluas termasuk dalam kehidupan politik lokal.

### **Tantangan**

Tantangan partisipasi politik kedepan tidak hanya terbatas pada soal pemilu saja. Partisipasi politik akan meluas sampai pada aspek proses penyusunan kebijakan publik. Untuk itu perlu disepakati aturan main dalam mewadahi perkembangan kualitas dan kuantitas partisipasi politik dalam masyarakat.

## **2. Kepemerintahan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Partisipatif**

Pada kurun waktu sebelum era reformasi, penempatan aparatur pemerintah sebagai salah satu pilar kekuasaan politik telah mendatangkan dilema ketika terjadi reformasi dan perubahan kekuasaan politik. Hal ini terjadi karena sudah sejak lama aparatur pemerintah berada dalam posisi yang tidak netral, kurang memiliki pola pengembangan karir yang jelas berbasis pada profesionalitas dan kompetensi. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di satu pihak, realokasi dan redistribusi aparatur perlu menggunakan pertimbangan manajerial, di lain pihak sulit mengabaikan pertimbangan non manajerial (sosial, psikologis dan kemanusiaan). Bila semata menggunakan pertimbangan manajerial, maka akan terjadi rasionalisasi besar-besaran dan potensial menimbulkan gejolak sosial. Bila dominan diwarnai pertimbangan non manajerial menimbulkan dampak inefisiensi serta ketidaksesuaian antara struktur organisasi, jumlah aparatur dan beban kerja. Kondisi dilematis tersebut semakin nampak ketika daerah diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan jumlah unit organisasi berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Secara faktual kombinasi pertimbangan manajerial dan non manajerial dalam penempatan aparatur sulit dielakkan.

Hal ini semakin mencolok ketika muncul Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dimana di dalamnya memberi banyak pembatasan terhadap jumlah dan jenis unit organisasi, yang berakibat daerah mengalami kesulitan bahkan bereaksi melakukan protes, penundaan bahkan penolakan. Terjadinya perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka harapan baru bagi daerah dalam mengatasi situasi dilematis.

Pembangunan yang diselenggarakan sebelum era reformasi memiliki penekanan yang sudah cukup besar pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat. Kondisi masa lalu masih menunjukkan adanya banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya diskriminasi layanan, dan keterbatasan cakupan layanan. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan dasar semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan, seperti: pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lain-lain. Beberapa langkah perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Madiun terkait dengan pelayanan publik adalah semakin meningkatnya tuntutan publik akan sistem manajemen pemerintahan yang menekankan pada kualitas pelayanan publik, yang memperhatikan pengutamaan hak-hak publik melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi.

Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam peranan pemerintah (institusi birokrasi) dalam penyelenggaraan pembangunan, dari peran negara yang sangat dominan menjadi peran negara yang semakin berkurang sejalan dengan semakin besarnya peran yang dimainkan oleh komponen masyarakat sipil dan swasta/pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan ini sangat ditentukan keberhasilannya oleh institusi birokrasi pemerintah. Pembentukan birokrasi pemerintah (dalam hal ini perangkat pemerintah daerah), sebelum era otonomi daerah (2001) sangat diwarnai dengan nuansa sentralistik (menekankan pada *physical structure*), dimana semuanya ditentukan oleh pusat. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pembangunan dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil hasil pembangunan telah menjadi pola pendekatan yang diterapkan Pemerintah Kota Madiun.



## **Tantangan**

Tantangan ke depan terkait dengan aspek kelembagaan pemerintah ini adalah kelembagaan pemerintah daerah semakin dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dapat selalu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan teknologi informasi.

Tantangan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan partipatif kedepan setidaknya ada dua hal :

- a. tantangan internal berupa peningkatan kualitas SDM aparatur dan kelembagaan pemerintahan.
- b. tantangan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI DAN**

#### **ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **A. VISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pada gambaran dan analisa makro terhadap kondisi Kota Madiun pada bab terdahulu yang antara lain memuat kondisi eksisting makro dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat lebih dikembangkan, maka dirumuskan Visi Kota Madiun sebagai berikut :

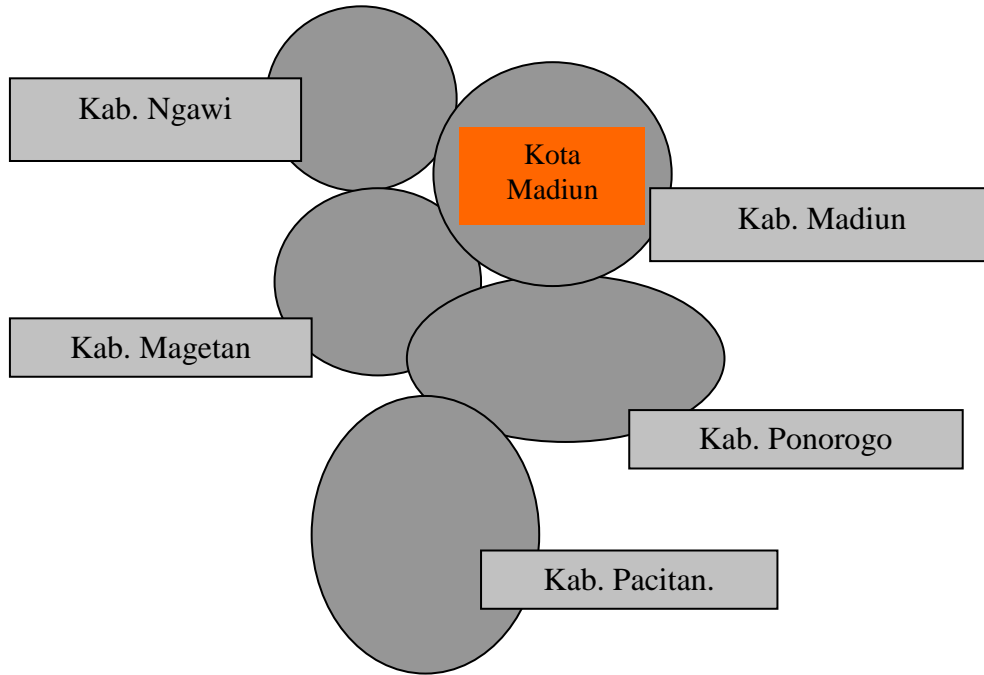
**“ TERWUJUDNYA KOTA MADIUN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN JAWA  
TIMUR BAGIAN BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA ”**

Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2005-2025 tersebut di atas mengarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan kota dan wilayah yang harus dapat diukur pencapaiannya. Penjelasan komponen Visi tersebut adalah sebagai berikut :

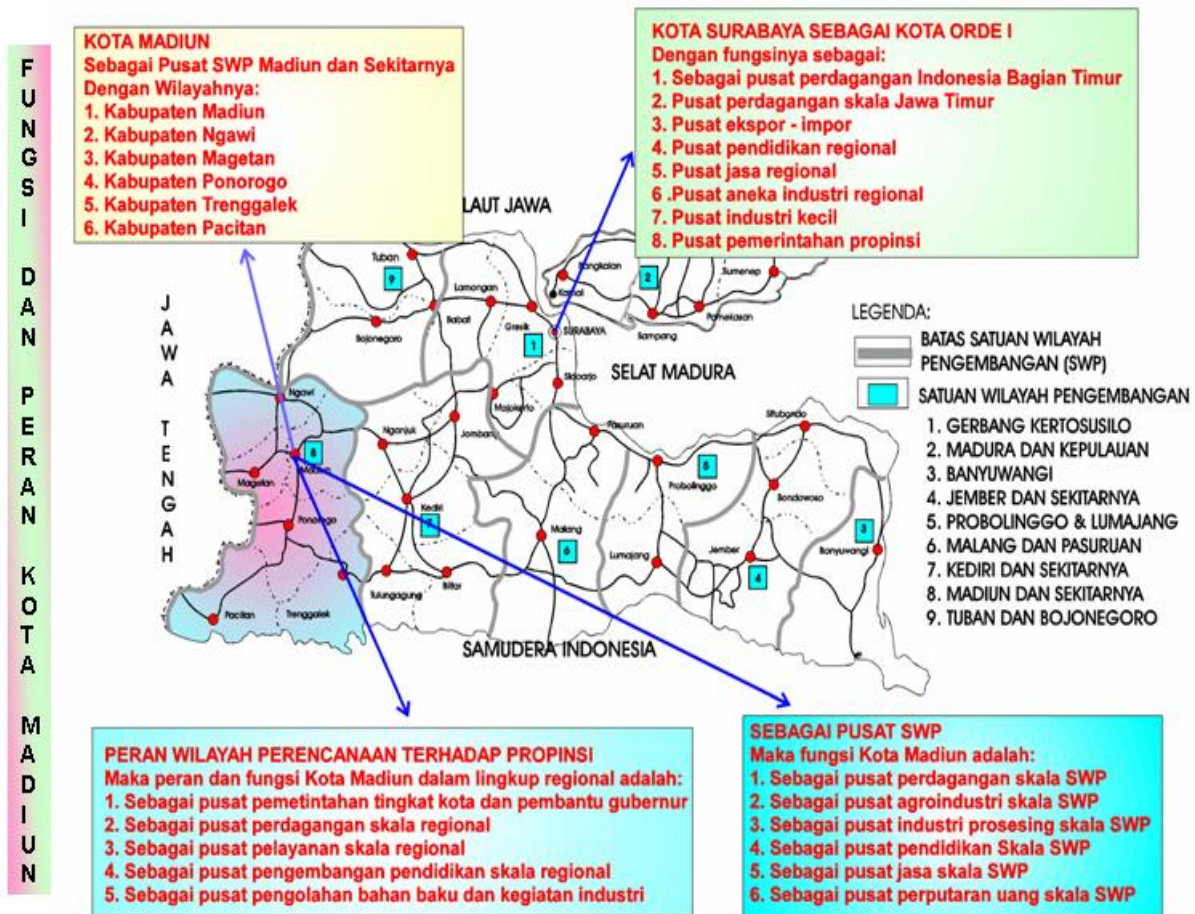
##### **PUSAT PENGEMBANGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT**

Sejak zaman pemerintahan penjajah Belanda, Kota Madiun ditetapkan sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada setiap kurun waktu perencanaan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, juga tetap menetapkan kota ini sebagai *sub regional centre* atau Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian Barat.

Sketsa peta berikut menunjukkan posisi strategis Kota Madiun sebagai *sub regional centre*.



Sketsa Peta 1 : Posisi Strategis Kota Madiun di antara Kota-kota Kabupaten sekelilingnya. Jarak tempuh terjauh adalah dari Kota Kabupaten Pacitan ± 100 Km.



Kota Madiun Tahun 2002 – 2012 diatas juga dapat dijelaskan fungsi dan peran Kota Madiun sebagai berikut :

Kota Madiun mengemban peran terhadap wilayah perencanaan Provinsi Jawa Timur sebagai :

1. pusat pemerintahan tingkat kota dan pembantu gubernur
2. pusat perdagangan skala regional
3. pusat pelayanan skala regional
4. pusat pengembangan pendidikan skala regional
5. pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri.

Dengan ditetapkannya Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), maka Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai :

1. pusat perdagangan skala SWP
2. pusat agroindustri skala SWP
3. pusat industri prosesing skala SWP
4. pusat pendidikan skala SWP
5. pusat jasa skala SWP
6. pusat perputaran uang skala SWP

Fakta lain menunjukkan bahwa Kota Madiun tidak mempunyai sumber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi daerah. Dengan demikian, satu-satunya potensi yang layak diandalkan dalam mengembangkan kota adalah fakta historis dan fakta geografis yang menempatkan Kota Madiun pada posisi strategis sebagai pusat wilayah pengembangan di Jawa Timur bagian Barat.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur juga disebutkan bahwa fungsi pusat pengembangan adalah pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan dan kesehatan. Fungsi dan peran kota Madiun bagi kota-kota lain di sekitarnya (hinterland) adalah membawa dampak peningkatan perkembangan kota sampai melebihi batas wilayah administrasinya (wilayah Jawa Timur bagian barat). Lebih jauh fungsi tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

- a. menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.
- b. sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- c. sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- d. sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk :

- a. menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.
- b. mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Jawa Timur.
- c. mendukung rencana struktur ruang wilayah Jawa Timur yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah nasional dan struktur tata ruang kota/kabupaten.

Berdasarkan fakta tersebut, mengandung makna bahwa ditinjau dari berbagai aspek dan dimensi, Kota Madiun di masa depan sangat diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi dalam bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri tertentu.

Pertumbuhan bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri tertentu tersebut akan menjadi *leading sector* atau gerbong utama penggerak pertumbuhan ekonomi, yang akan menjadikan Kota Madiun maju dan sejahtera.

## **MAJU**

Secara sederhana pengertian maju antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD. Beberapa indikator yang bisa membantu menunjukkan tingkat kemajuan suatu kota antara lain indikator ekonomi, indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator yang berkaitan dengan penerapan *Good Governance*.

Indikator ekonomi pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh tingkat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang proporsional dan adil.

Indikator pendidikan pada dasarnya merujuk pada tingkat pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keunggulan kompetensi maupun komparatifnya.

Indikator kesehatan merujuk pada kualitas kesehatan dan hasil akhirnya berupa usia harapan hidup yang meningkat.

Indikator penerapan *Good Governance* merujuk pada dua sisi. Pertama adalah sejauh mana pelayanan publik didasarkan pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) dari seluruh unit kerja penyelenggara pemerintahan, dan kedua adalah sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas penerapan *Good Governance*.

Dari sisi tampilan fisik dan lingkungan, kemajuan suatu kota tercermin pula dari tampilan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, asri, sehat dan bersih, yang bebas dari pencemaran lingkungan. Terdapat keseimbangan dan keserasian antara kreatifitas fisik hasil pembangunan dengan lingkungan alam, dan perilaku (*behaviour*) masyarakat kota. Terwujud integrasi aspek-aspek fisik-ekologis, sosial-ekonomi dan estetika dalam pembangunan dan pengelolaan Tata Guna Tanah, Bangunan, Transportasi, Infrastruktur, dan Lansekap Kota.

## **SEJAHTERA**

Kemajuan kota di segala aspek kehidupan harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat.

Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Tercakup dalam aspek kesejahteraan disini adalah juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat untuk mengemban mandat yang termaktub dalam visi.

Misi Kota Madiun untuk periode 2005 sampai dengan 2025 adalah :

1. meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal ;
2. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial ;

3. mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai ;
4. meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional ;
5. melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

### **C. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun tahun 2005-2005 adalah mewujudkan cita-cita Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (Jawa Timur bagian Barat) yang maju sehingga memberikan hasil akhir bagi tercapainya masyarakat Madiun yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mampu mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang di atas perlu diupayakan pencapaian Misi Kota Madiun beserta Sasaran-Sasaran Pokok yang hendak dicapai dengan berpedoman pada Arah Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal**

Sasaran-sasaran pokok dari misi di atas untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya sinergitas kebijakan ekonomi yang mampu memadukan dan mengelola sumber keuangan baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat menuju peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara berkesinambungan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB lima tahun pertama di atas 6% per tahun, sedangkan tahun berikutnya sampai dengan tahun 2025 diharapkan pertumbuhan mencapai di atas 7%. Adapun laju pertumbuhan penduduk tetap dipertahankan rendah yaitu sebesar 0,76% setiap tahun, sehingga pendapatan perkapita proporsional dengan pertumbuhan ekonomi.
- c. meningkatnya investasi, khususnya sektor yang memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tercapai tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan tidak lebih 5% pada tahun 2025
- d. meningkatnya serta optimalnya fungsi infrastruktur untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai sentra pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat.

Arah Pembangunan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan sinergi antara perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, dan strategi pembangunan bidang ekonomi.
- b. mewujudkan penerapan kebijakan peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber keuangan pemerintah, negara sahabat, swasta, dan masyarakat.
- c. membangun Sistem Informasi di Bidang Ekonomi & Potensi Daerah yang proporsional berbasis jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat diakses secara luas oleh publik.
- d. mengembangkan industri pengolahan, khususnya industri menengah kecil atau industri nonformal yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga diharapkan produksinya meningkat dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap total produksi dari sektor industri.
- e. meningkatkan peran koperasi melalui peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota dan peningkatan manajemen serta akses permodalan.
- f. meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi permodalan, manajerial dan akses pasar.
- g. mengembangkan potensi kepariwisataan.
- h. meningkatkan intensifikasi dan penggunaan teknologi pertanian serta pengembangan agribisnis skala SWP.
- i. mewujudkan penerapan kebijakan kependudukan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- j. menciptakan iklim investasi yang menarik dan sehat serta mendorong penanaman modal dalam negeri maupun asing dengan proaktif menawarkan potensi daerah.
- k. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan yang berorientasi pada optimalisasi penyerapan tenaga kerja.
- l. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi infrastruktur, khususnya sektor-sektor prioritas yang menjadi penggerak pertumbuhan, dan diarahkan untuk lebih mendukung iklim investasi.
- m. menciptakan sentra-sentra perdagangan yang menjadi pusat perkulakan bagi masyarakat/pedagang wilayah sekitar.



## **2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial**

Sasaran-sasaran pokok dari misi di atas untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

### **a. Terwujudnya konsistensi pembangunan bidang pendidikan pada tiga pilar utama pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik.**

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatnya jumlah siswa dari luar kota pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Kota Madiun, sesuai peran wilayah sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur bagian Barat.
- 2) mMeningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Guru sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.
- 3) meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk memberikan dasar menuju tercapainya rata-rata tingkat pendidikan penduduk setara diploma / universitas.
- 4) meningkatnya mutu dan cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta.
- 5) angka partisipasi sekolah PAUD, dengan minimal cakupan di atas 85% pada akhir tahun 2025.
- 6) terwujudnya lembaga Perguruan Tinggi yang proporsional dengan kebutuhan Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.
- 7) meningkatnya pengembangan Olah Raga prestasi maupun nonprestasi.
- 8) terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender secara proporsional.
- 9) terwujudnya pengembangan kualitas apresiasi terhadap seni dan budaya.

Indikator-indikator di atas diharapkan selalu meningkat secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dapat di ukur pencapaiannya secara berkala dalam jangka menengah atau lima tahunan.

Arah pembangunan untuk pencapaian indikator dan sasaran pokok bidang pendidikan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang proporsional dengan peran Kota Madiun sebagai pusat pendidikan skala SWP.
- 2) merintis sekolah-sekolah unggulan di semua jenjang pendidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar internasional, melalui kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dunia usaha dan industri baik dalam negeri maupun mancanegara.
- 3) mewujudkan pencapaian Sekolah Standar Nasional pada semua jenjang pendidikan secara bertahap.
- 4) membangun Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang berbasis jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semua sekolah sebagai media pembelajaran siswa maupun pusat informasi pendidikan yang dapat diakses secara luas oleh publik.
- 5) meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru.
- 6) mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tanpa dipungut biaya pendidikan.
- 7) menyelaraskan dan melengkapi kurikulum dengan aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
- 8) membudayakan nilai-nilai luhur bangsa, dan budi pekerti pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- 9) menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah secara optimal dan proporsional.
- 10) menciptakan sistem pengelolaan keuangan sekolah terpadu, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, secara transparan dan akuntabel.
- 11) memfasilitasi pengembangan Pendidikan Luar Sekolah.
- 12) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola, kelembagaan, sarana prasarana, dan kurikulum PAUD yang proporsional dengan kebutuhan.
- 13) memfasilitasi pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan PAUD dalam proses pendidikan anak.

- 14) memfasilitasi berdirinya Perguruan Tinggi Negeri, baik yang merupakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah ada maupun dari Kota Madiun yang mempunyai kapabilitas untuk dikembangkan.
- 15) mendorong pengembangan kualitas Perguruan Tinggi di Kota Madiun dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang optimal.
- 16) mendorong sistem pembinaan Olah Raga yang profesional dengan melibatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 17) memfasilitasi terwujudnya sarana prasarana dan pendekatan pengembangan kesetaraan dan keadilan gender.
- 18) memfasilitasi tumbuh kembangnya kehidupan seni dan budaya.
- 19) mewujudkan pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD dan tetap memperhatikan proporsionalitasnya dengan kebutuhan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pendidikan skala SWP.

**b. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.**

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah :

- 1) meningkatnya kualitas cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan.
- 3) terbangunnya Sistem Informasi Kesehatan yang terpadu sebagai penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
- 4) meningkatnya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang memerlukan penanganan khusus antara lain penyalahgunaan Napza, HIV/AIDS dan *Avian Influenza*.
- 5) meningkatnya pemberdayaan dan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Arah pembangunan bidang kesehatan untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :

- 1) mewujudkan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat skala SWP.
- 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan yang proporsional dengan kebutuhan.
- 3) meningkatkan sinergitas cakupan pelayanan kesehatan melalui optimalisasi kerjasama lembaga-lembaga kesehatan.
- 4) meningkatkan kualitas peralatan medis dan sarana pendukung pelayanan kesehatan baik untuk segi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- 5) membangun Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pusat akses informasi dan pengolahan data serta penunjang pelayanan kesehatan.
- 6) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap masalah kesehatan yang terjadi dan akan terjadi, serta Kejadian Luar Biasa antara lain penyalahgunaan Napza, HIV/AIDS, dan *Avian Influenza*.
- 7) mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat secara sadar, mandiri, dan berkelanjutan.
- 8) mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- 9) meningkatkan kapasitas anggaran yang proporsional dengan pencapaian Arah Pembangunan Kesehatan Kota Madiun.

**c. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial.**

Penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial selain menjadi tugas pemerintah juga harus diupayakan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Pencapaian minimal terhadap sasaran pokok untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial masyarakat adalah :

- 1) meningkatnya cakupan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 3) meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana Panti Sosial beserta fasilitas pendukungnya, terutama yang dikelola oleh masyarakat.

Arah pembangunan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sosial masyarakat adalah :

- 1) meningkatnya cakupan pelayanan sosial dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) memfasilitasi peningkatan kualitas dan penguatan lembaga sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.
- 3) meningkatkan kualitas program, anggaran, dan cakupan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4) menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola panti sosial yang proporsional.
- 5) mendorong partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.**

**a. Terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel.**

Pencapaian minimal untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel adalah :

- 1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah :

- a) memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Penelitian dan Pengembangan secara proporsional dalam pemerintahan.
- b) membangun Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Publik.
- c) memantapkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Madiun yang efektif dan efisien.

- d) meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e) meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
- f) meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.
- g) meningkatkan sistem administrasi pengelolaan kearsipan yang baik.

- 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik Bidang Pemerintahan Umum.

Arah pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Pemerintahan Umum adalah :

- a) menerapkan dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap bidang pelayanan publik.
  - b) melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan publik untuk perbaikan mutu pelayanan.
- 3) terwujudnya kualitas perencanaan yang lebih partisipatif dan sistem perencanaan yang lengkap dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah pembangunannya adalah :

- a) menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek serta perencanaan teknis berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Kota Madiun.
- b) mewujudkan sistem pengawasan internal yang berkualitas untuk menilai pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif, dan memperhatikan masukan dari masyarakat.

- 4) meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah yang profesional, yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Arah pembangunannya adalah menciptakan pola pengembangan pegawai yang kompeten di bidangnya, melalui pendidikan baik untuk pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan pelatihan teknis.

- 5) meningkatnya kemantapan kehidupan berpolitik, demokrasi, dan wawasan kebangsaan.

Arah pembangunan untuk memantapkan kehidupan berpolitik, demokrasi dan berbangsa adalah memfasilitasi berfungsinya organisasi politik dan kemasyarakatan secara proporsional.

- 6) meningkatnya penguatan kelembagaan legislatif.

Arah pembangunannya adalah mewujudkan hubungan yang sinergis antara eksekutif dengan legislatif.

**b. Terwujudnya situasi tertib, aman, dan damai.**

Pencapaian minimal sasaran pokok untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :

- 1) terwujudnya masyarakat sadar dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) terciptanya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama, etnis, dan kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa beradab.
- 3) terwujudnya sikap dan perilaku religius warga kota.

Arah pembangunan guna mewujudkan situasi tertib, aman dan damai adalah :

- 1) meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 2) meningkatkan kemampuan aparat trantib pemerintah kota dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan.
- 3) meningkatkan koordinasi dengan POLRI dan TNI dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif aman dan tertib.
- 4) meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan peran aktif masyarakat.
- 5) mengembangkan kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.

**4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.**

Sasaran pokok untuk mewujudkan misi tersebut diatas adalah terwujudnya kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan di lingkungan internal Kota Madiun, maupun pihak eksternal (nasional dan internasional) yang *concern* terhadap pembangunan Kota Madiun.

Arah pembangunan untuk mewujudkan misi tersebut diatas adalah :

- a) memfasilitasi terbentuknya kelembagaan khusus untuk memperluas dan memperkuat jaringan kerja sama serta mempercepat akselerasi pembangunan daerah.
- b) memfasilitasi terlaksananya kerja sama pembangunan daerah di segala bidang dengan berbagai pihak.
- c) meningkatkan kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan pembangunan dalam seluruh proses pembangunan.

**5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.**

Sasaran pokok untuk mewujudkan misi tersebut diatas antara lain ;

- a) terwujudnya sikap dan perilaku *Clean dan Green Governance*.
- b) terwujudnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- c) terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, dan aman dari pencemaran lingkungan.

Arah Pembangunan untuk mencapai misi tersebut adalah :

- a) memfasilitasi pengembangan kesadaran kolektif, sikap, dan perilaku *Clean and Green Governance* terhadap seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
- b) mewujudkan konsep-konsep perancangan Kota Ekologi (*Eco City*) dalam pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c) mewujudkan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, disertai dengan pengendalian tata ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat.
- d) mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali.
- e) meningkatkan/memantapkan fungsi pengelola lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah.



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Madiun dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun ke depan.

RPJP ini menjadi arah dan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Beberapa faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan mewujudkan Visi **“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA”** antara lain adalah :

**a. Peningkatan kemampuan keuangan daerah.**

Peningkatan kemampuan keuangan daerah mempunyai peran sentral dalam menentukan besar kecilnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada dasarnya merupakan tolok ukur nyata dari kemampuan suatu daerah dalam membeayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Secara singkat bisa dikatakan bahwa visi, misi, sasaran dan arah pembangunan yang telah kita tetapkan dalam RPJP Kota Madiun Tahun 2005 - 2025 menuntut kemampuan keuangan daerah yang proporsional. Sedikitnya ada 2 (dua) langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan performance kemampuan keuangan daerah kota Madiun .

Pertama adalah upaya peningkatan kemampuan pembeayaan melalui optimalisasi potensi sumber-sumber keuangan baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Kedua adalah peningkatan kemampuan pengelolaan melalui optimalisasi segi efisiensi dan efektifitasnya.

**b. Komitmen dari kepemimpinan penyelenggara Pemerintahan Daerah.**

Komitmen dari kepemimpinan penyelenggara Pemerintahan Daerah sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi terhadap upaya pencapaian visi, misi, sasaran dan arah pembangunan. Hal ini disebabkan bahwa dari kepemimpinan penyelenggara Pemerintahan Daerah dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan menentukan pola-pola program, sasaran, dan kegiatan untuk pencapaian Visi dan Misi.

**c. Penguatan pola pembangunan partisipatif.**

Penguatan pola pembangunan partisipatif setidaknya diperlukan karena beberapa alasan. Pertama adalah pembangunan partisipatif akan memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peran mereka pada proses pelaksanaan pembangunan. Kedua adalah peningkatan kualitas usulan-usulan dalam program dan kegiatan pembangunan. Ketiga adalah peningkatan kualitas masukan terhadap evaluasi dan pelaksanaan pembangunan yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kualitas peran dalam menjaga konsistensi terhadap Visi dan Misi Kota Madiun.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**